

**BANTUAN KEMANUSIAAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP  
AFGHANISTAN PASCA PENARIKAN MILITER TAHUN 2021-2024**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**ANNISA MULYA REZEKI**

21323184

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**DINAMIKA BANTUAN KEMANUSIAAN AMERIKA SERIKAT  
TERHADAP AFGHANISTAN PASCA PENARIKAN MILITER TAHUN**

**2021-2024**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh :

**ANNISA MULYA REZEKI**

21323184

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Bantuan Kemanusiaan Amerika Serikat Terhadap Afghanistan Pasca Penarikan  
Militer Tahun 2021-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

20 Agustus 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



*Carina*  
Carina Dham Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Se.
- 2 Ayu Heryati Naqsbandiyah, S.IP., M.A.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 26 Agustus 2025*



*ANNISA MULYA REZEKI*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Cakupan penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka .....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara.....	18
1.8 Metode Penelitian.....	21
1.8.1 Jenis Penelitian.....	21
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	21
1.8.3 Metode Pengumpulan Data .....	21
1.8.4 Proses Penelitian .....	21
1.9 Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB 2</b>	
<b>BANTUAN KEMANUSIAAN AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN</b>	
<b>SAAT ERA TALIBAN .....</b>	<b>23</b>
2.1. Krisis kemanusiaan di Afghanistan di masa Taliban (2021-2024).....	23

2.2. Dampak Penarikan Militer AS dari Afghanistan .....	26
2.3. Keberlanjutan Komitmen AS dalam bantuan kemanusiaan.....	29
<b>BAB 3 PERTIMBANGAN AMERIKA SERIKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN DI AFGHANISTAN SAAT MASA TALIBAN</b> .....	<b>35</b>
3.1. Politik Domestik .....	36
3.2. Kapabilitas Militer dan Ekonomi .....	39
3.3. International Context.....	45
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
4.1. Kesimpulan .....	50
4.2. Rekomendasi .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar Kerangka Model Teori Penelitian.....	11
---	----

## ABSTRAK

Penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan pada tahun 2021 menjadi pertanda signifikan dalam keterlibatan negara tersebut di kawasan, khususnya dalam pemberian bantuan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika bantuan yang diberikan Amerika Serikat untuk Afghanistan dengan menyoroti antara komitmen moral untuk membantu rakyat Afghanistan dan kebijakan sanksi atas kelompok Taliban serta sebagai bentuk upaya dalam mempertahankan tanggung jawab moral terhadap masyarakat Afghanistan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori *Foreign Policy Decision Making*, yang mana konsep teori ini sering dikaitkan dengan pendekatan rasional dalam memahami keputusan negara dalam politik internasional. Ketegangan yang disebabkan konflik di Afghanistan membuat penelitian ini semakin relevan dan menarik karena mengangkat isu yang kompleks mengenai bagaimana kekuatan besar dunia menyeimbangkan kepentingan geopolitik dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Penelitian ini juga menyoroti dimana Amerika Serikat dengan Afghanistan kini berada dalam ketegangan antara kepentingan politik dan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.

**Kata-kata kunci:** Afghanistan, Amerika Serikat, Bantuan Kemanusiaan, Krisis Kemanusiaan

## ABSTRACT

The withdrawal of US military forces from Afghanistan in 2021 marks a significant shift in the country's engagement in the region, particularly in the provision of humanitarian assistance. This research aims to analyze the dynamics of assistance provided by the United States to Afghanistan by highlighting the moral commitment to help the Afghan people and the sanctions policy against the Taliban group as well as an effort to maintain moral responsibility to the Afghan people. By using a qualitative approach and *Foreign Policy Decision Making* theory, where the concept of this theory is often associated with a rational approach in understanding state decisions in international politics. The tensions caused by the conflict in Afghanistan make this research more relevant and interesting because it raises complex issues about how the world's major powers balance geopolitical interests with humanitarian principles. This research also highlights where the United States and Afghanistan are now in tension between political interests and urgent humanitarian needs.

**Keywords :** Afghanistan, Humanitarian aid, Humanitarian crisis, United States

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konflik yang berkepanjangan di Afghanistan telah menciptakan krisis kemanusiaan yang mengakibatkan banyak korban jiwa, baik akibat serangan militer dari pasukan Amerika Serikat maupun perlawanan dari Taliban (Tronc dan Nahikian 2018). Data menunjukkan bahwa lebih dari 350.000 jiwa telah hilang dan 3,2 juta anak menderita kekurangan gizi karena kelaparan. Menurut misi bantuan PBB di Afghanistan, lebih dari 5.183 warga sipil telah tewas atau terluka sejak tahun 2021, Negara ini telah menerima lebih dari \$5,8 miliar dalam bantuan luar negeri sejak 2011 untuk mengatasi konflik militer dan sipil (Musta'id 2022). Kerusakan akibat perang antara Amerika Serikat dan Taliban mendorong Amerika Serikat untuk merasa memiliki tanggung jawab moral dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada Afghanistan.

Bantuan kemanusiaan merupakan elemen penting dari bantuan internasional yang bertujuan untuk mematuhi norma-norma hubungan internasional yang menekankan kewajiban negara-negara kaya membantu negara-negara miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan (Desai dkk. 2014). Selain itu bantuan internasional bertujuan untuk mendukung negara-negara dalam meningkatkan indikator perekonomian, keamanan, dan stabilitas politik untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pada 15 Agustus 2021, Taliban merebut kendali atas seluruh Afghanistan sementara Amerika Serikat menarik seluruh pasukan militernya setelah 20 tahun invasi di negara tersebut. Kekuasaan Presiden Ashraf Ghani juga runtuh dengan jatuhnya Kabul ke tangan

Taliban. Ghani telah didukung oleh Amerika Serikat dalam upayanya membangun negara sebagai bagian dari rekonstruksi untuk memperkuat demokrasi di Afghanistan (Andisha 2022). Dalam menanggapi situasi ini, Pemerintahan Joe Biden menunjukkan respons yang pragmatis, mencerminkan pendekatan pragmatisme mereka terhadap isu-isu di Timur Tengah, terutama di Afghanistan. Biden telah menunjukkan sikap skeptis terhadap invasi AS di Afghanistan sejak kampanye kepresidenannya, dan sikap tersebut didukung dengan beberapa pernyataannya setelah terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat di berbagai forum publik (Safira dkk. 2023).

Bahkan Biden secara konsisten menyoroti besarnya anggaran yang telah dikeluarkan untuk operasi militer di Afghanistan, yang telah melebihi 2 Triliun Dolar AS, menganggapnya sebagai kegagalan (Mockaitis 2022). Hal ini membuat Biden tidak lagi mengutamakan isu terorisme jihadis di Afghanistan sebagai fokus utama kebijakan luar negeri mereka. Sebaliknya, Biden lebih memperhatikan alokasi anggaran AS yang difokuskan pada rekonstruksi nasional pasca pandemi pada tahun 2021. Perubahan fokus ini merupakan respons terhadap kritik terhadap pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump yang dianggap gagal dalam merespons pandemi dengan cepat (Imranullah dan Hakimuddin 2024). Biden, sejak menjabat sebagai Wakil Presiden AS pada tahun 2009, secara konsisten menganggap bahwa upaya *Nation Building* baik oleh Pemerintah Kabul maupun oleh Taliban tidak mampu memberikan pemerintahan yang efektif bagi seluruh masyarakat Afghanistan. Pendekatan politik Biden ini didukung oleh pernyataannya dua hari setelah penarikan militer AS dari Kabul, yang menegaskan bahwa kebijakan luar negeri AS terhadap Afghanistan di bawah

pemerintahan Taliban akan difokuskan pada bantuan kemanusiaan melalui upaya diplomasi dan partisipasi aktor-aktor internasional untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak hidup wanita, anak-anak, dan masyarakat Afghanistan secara menyeluruh (Miller 2022). Penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang mendorong Amerika Serikat untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan meskipun AS tidak pasti dalam mengakui kedaulatan pemerintahan Taliban. Meskipun Presiden Joe Biden menegaskan penolakan AS untuk mengakui kedaulatan Taliban, ia telah menandatangani perintah eksekutif untuk melepas aset Taliban senilai \$7 miliar yang dibekukan di Bank Sentral AS, di mana sebagian dari dana tersebut akan dialokasikan untuk bantuan luar negeri ke Afghanistan (AJIL 2023). Selain itu, AS dan Taliban telah bertemu di Doha, Qatar pada Oktober 2021 untuk mencapai kesepakatan, termasuk bantuan kemanusiaan AS dan komitmen Taliban untuk memfasilitasi distribusi bantuan dan bekerja sama dengan organisasi yang berfokus pada penyaluran bantuan kemanusiaan.

Meskipun demikian, Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, menegaskan bahwa kesepakatan bantuan kemanusiaan ini tidak akan mencakup pengakuan politik AS terhadap Taliban, dan sanksi terhadap Taliban akan tetap diberlakukan, sehingga aliran bantuan kemanusiaan akan melibatkan pihak ketiga seperti organisasi independen, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi non-pemerintah (Cowan 2023). Melanjutkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan tidak hanya penting untuk memperbaiki kerusakan pasca 20 tahun invasi, tetapi juga merupakan upaya Pemerintahan Joe Biden untuk menghindari kritik dari oposisi dalam politik AS, Biden telah berkomitmen untuk mengakhiri invasi di Afghanistan sejak masa jabatannya sebagai Wakil Presiden di bawah pemerintahan Obama.

Namun, keputusannya untuk menarik seluruh pasukan AS, tanpa mempertimbangkan opsi mempertahankan sebagian pasukan untuk mencegah eskalasi konflik di Kabul, telah menimbulkan kritik dari publik AS dan kekhawatiran dari dunia internasional (The Lancet 2021). Kekosongan kekuasaan pasca penarikan pasukan AS telah memberikan kesempatan bagi Taliban untuk mengambil alih kendali pemerintahan, meskipun tantangan untuk mendapatkan pengakuan internasional masih besar karena baru-baru ini mereka memegang kendali penuh di Afghanistan dan belum ada negara yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Pengakuan internasional sangat penting bagi legitimasi Taliban di tingkat internasional, yang akan memungkinkan mereka untuk berperan sebagai entitas yang merdeka dan subjek dalam sistem hukum internasional, di bawah pemerintahan Biden, AS tetap memberlakukan sanksi terhadap Taliban dengan membekukan sebagian aset mereka di lembaga keuangan AS dan IMF. Dalam pernyataan terbaru, Pemerintahan Biden juga menyita sebagian aset DAB senilai \$3,5 miliar untuk memenuhi klaim hukum dari keluarga korban serangan 9/11, hal ini menimbulkan tantangan baru bagi pemerintahan Taliban dalam mengelola sumber daya dan aliran kas Afghanistan di pasar internasional (Gordon 2019).

Pada akhirnya, penelitian ini akan mengulas bahwa AS memiliki pendekatan yang bertentangan dalam memahami isu di Afghanistan. Di satu sisi, Pemerintah AS di bawah kebijakan luar negeri Joe Biden menganggap bahwa Afghanistan tidak lagi menjadi prioritas utama dalam agenda luar negeri mereka, dan mereka menunjukkan sikap skeptis terhadap kemampuan rezim Taliban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Afghanistan di masa depan. Namun, di sisi

lain, AS merasa terbebani oleh tanggung jawab moral untuk membantu dalam upaya bantuan kemanusiaan ke Afghanistan, sebagai respons atas dampak 20 tahun perang AS di negara tersebut yang telah menyebabkan kemiskinan dan kekacauan yang besar bagi penduduk Afghanistan (The Lancet 2021).

Sebagian besar penelitian mengenai bantuan kemanusiaan AS ke Afghanistan cenderung menekankan pada kepentingan Amerika Serikat sebagai penggerak utama bantuan internasional akibat dampak dari konflik yang sedang berlangsung. Konflik ini telah menyebabkan banyak korban, baik selama masa kepemimpinan George W. Bush (2001-2009), Barack Obama (2009-2017), maupun Donald Trump (2017-2021). Kebaruan atau novelty dalam penelitian ini terletak pada eksplorasi kontradiksi antara kebijakan bantuan kemanusiaan Amerika Serikat dan sanksi terhadap Taliban. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas salah satu aspek ini secara terpisah, seperti kebijakan bantuan atau sanksi, tanpa menyelami lebih dalam bagaimana kedua kebijakan yang tampaknya bertolak belakang ini dijalankan secara bersamaan. Elemen novelty utama adalah dualitas kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dimana di satu sisi, Amerika Serikat memberikan bantuan kemanusiaan untuk membantu masyarakat Afghanistan, tetapi di sisi lain, mereka tetap menerapkan sanksi ekonomi dan politik yang ditujukan untuk melemahkan pemerintahan Taliban.

Penelitian ini mengkaji bagaimana Amerika Serikat menjalankan kebijakan ganda tersebut dan menyoroti tensi serta dilema yang dihadapi dalam menyeimbangkan antara memberikan bantuan guna mencegah krisis kemanusiaan di Afghanistan tanpa memperkuat posisi Taliban. Penyeimbangan antara bantuan dan sanksi ini jarang dieksplorasi secara mendalam, sehingga memberikan

perspektif yang segar dalam analisis kebijakan luar negeri. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana dualitas kebijakan tersebut memengaruhi legitimasi internasional pemerintahan Taliban. Meskipun Taliban menerima bantuan, sanksi yang terus berlanjut menurunkan citra mereka di mata dunia, dengan demikian penelitian ini memberikan analisis lebih dalam terhadap konsekuensi geopolitik dan diplomatik dari kebijakan Amerika Serikat dan membuka ruang diskusi baru mengenai bagaimana kontradiksi antara bantuan dan sanksi dapat berdampak pada stabilitas Afghanistan dan dinamika internasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari konteks yang telah diuraikan, muncul rumusan masalah : “Bagaimana opsi kebijakan bantuan kemanusiaan dirumuskan? Lalu siapa yang dominan mempengaruhi arah kebijakan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari judul yang akan penulis teliti berupa

1. Menganalisis bagaimana kebijakan ganda Amerika Serikat dapat mempengaruhi legitimasi internasional pemerintahan Taliban dan dampaknya terhadap stabilitas politik dan sosial di Afghanistan
2. Mengkaji dan menjelaskan dilema serta kontradiksi yang dihadapi Amerika Serikat dalam menyeimbangkan kebijakan bantuan kemanusiaan dengan sanksi terhadap Taliban

#### **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini merupakan studi dalam hubungan internasional yang memfokuskan pada kawasan di Afghanistan. Dimana pada penelitian ini penulis berfokus menganalisis permasalahan dalam cakupan rentang tahun 2021 hingga 2024. Penulis mengambil tahun 2021 sebagai awal dalam penelitian ini karena pada Agustus 2021 terdapat perubahan yang signifikan dalam pemerintahan di negara tersebut, dimana ketika Taliban mengubah secara drastis hubungan Afghanistan dengan komunitas internasional, salah satunya dengan kebijakan penerimaan bantuan. Dibawah periode ini beberapa faktor di Afghanistan pun semakin memburuk, seperti peningkatan kasus kelaparan dan beberapa akses dibatasi seperti pendidikan dan juga kesehatan. Penelitian dalam periode ini juga penting dibahas guna memahami bagaimana respon internasional dalam situasi yang ada di Afghanistan, efektivitas bantuan yang diterima serta bagaimana dampaknya dalam kemanusiaan di kawasan tersebut.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam Jurnal pertama yang berjudul “Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global”, yang ditulis oleh Boy Anugerah dan Jabinson Purba dijelaskan bahwa kekuasaan Taliban terhadap Afghanistan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kondisi politik, keamanan, maupun geopolitik global. Dimana faktor-faktor dari proses dari suatu negosiasi, respon internasional dan upaya konsolidasi internal Taliban menjadi jembatan dalam menciptakan kondisi politik serta keamanan yang stabil di Afghanistan yang berada di bawah rezim kekuasaan

Taliban. Peran Amerika Serikat dan berbagai negara-negara lain dalam menghadapi kekuasaan Taliban juga dapat mempengaruhi dinamika geopolitik global di masa depan. Selain itu, peralihan kekuasaan ini mempengaruhi hubungan diplomatik antara Afghanistan dengan negara-negara tetangga serta organisasi internasional, dengan adanya kekuatan Taliban, muncul tantangan baru bagi stabilitas regional yang memerlukan perhatian khusus dari komunitas global untuk menghindari potensi konflik berkepanjangan. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman mendalam mengenai kondisi politik dan juga keamanan Afghanistan yang berada di bawah rezim Taliban.

Adapun pada jurnal kedua yang ditulis oleh Sydney Aisyiyah Maharani, Mahendra Putra Kurnia dan Rika Erawaty yang berjudul “Perlindungan Terhadap Anak Akibat Konflik Bersenjata di Afghanistan Pasca Pengambilalihan Kekuasaan Oleh Taliban” membahas tentang bagaimana Taliban mengambil alih Afghanistan. Dimana dampaknya timbul pada situasi kemanusiaan dan bantuan internasional yang mana bantuan ini diperlukan oleh masyarakat sipil yang berada di Afghanistan. Pada jurnal ini juga mencakup bagaimana respons organisasi internasional seperti UNICEF mengenai perlindungan terhadap anak-anak mengenai pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban, yang merupakan bagian penting dari dinamika bantuan internasional di Afghanistan.

Berikutnya, pada jurnal berjudul “Tantangan Pemberian Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat ke Afghanistan Tahun 2021” yang ditulis sejumlah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ini membahas tantangan yang ada dalam penyaluran sejumlah bantuan internasional di Afghanistan ketika di bawah pemerintahan Taliban, termasuk

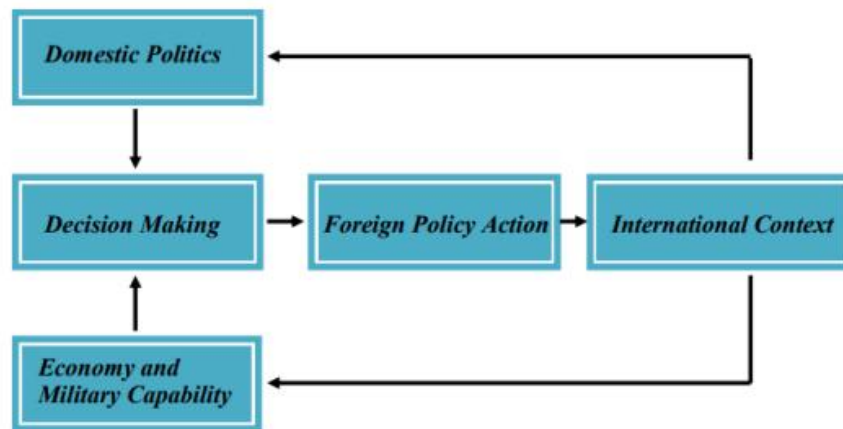
hambatan dalam distribusi berbagai bantuan dan peran dari Amerika Serikat. Dalam jurnal ini juga menyoroti ketergantungan dari Afghanistan terhadap bantuan asing serta dampaknya ketika bantuan tersebut berhenti, selain itu di dalam jurnal ini juga membahas strategi Amerika Serikat dalam memberikan bantuannya, yang mana kedua hal tersebut relevan dengan dinamika bantuan internasional di masa pemerintahan Taliban.

Berdasarkan ketiga jurnal yang ada di atas, beberapa jurnal sudah melengkapi berbagai pembahasan yang relevan mengenai bantuan kemanusiaan di masa pemerintahan Taliban di Afghanistan, tetapi belum ada yang membahas secara mendalam menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat. Pada penelitian ini menggunakan teori *Foreign Policy Decision Making* dari William D. Coplin untuk mengisi kekosongan tersebut.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *Foreign Policy Decision Making* yang dikemukakan oleh William D. Coplin. Dimana teori ini memberikan gambaran bahwa pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara bukan hanya didasarkan pada pertimbangan rasional semata, namun juga melibatkan interaksi yang kompleks antara aktor-aktor domestik dan kondisi eksternal negara. Dengan menggunakan teori ini penulis melihat adanya relevansi untuk menganalisis kebijakan Amerika Serikat dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan ketika Taliban memegang kendali pemerintahan.

Gambar 1 : Model Pengambilan Keputusan Kebijakan Politik Luar Negeri



(Coplin, 2013)

Coplin menjelaskan bahwa : *“Foreign policy decisions are the result of interactions among multiple actors, including bureaucratic agencies, political interest groups, and leaders who operate within both domestic and international constraints.”* (Coplin 1974).

Pernyataan diatas menegaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak dapat dipandang sebagai hasil keputusan individual tunggal, melainkan sebagai interaksi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan, preferensi dan pengaruh berbeda. Dalam perspektif Coplin, proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri mengharuskan para aktor memaksimalkan kepentingan masing-masing melalui negosiasi, kompromi dan konflik kepentingan. Analisis kebijakan luar negeri memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai peran setiap aktor, baik birokrasi, kelompok kepentingan ataupun pimpinan politik yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan luar negeri bersifat multidimensional karena melibatkan faktor

politik, ekonomi, militer, maupun tekanan global yang mana proses pembentukan kebijakan selalu dipengaruhi keseimbangan kekuatan antara aktor yang saling mempertahankan agenda masing-masing.

Politik domestik adalah salah satu faktor mendasar dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Coplin menegaskan bahwa aktor domestik seperti partai politik, media, dan kelompok kepentingan (*interest group*) mempunyai peran yang signifikan, dimana mereka merupakan kelompok yang mempunyai agenda tertentu dan dapat mempengaruhi arah kebijakan negara melalui kampanye publik, atau tekanan terhadap pembuat kebijakan (Coplin 1974).

Decision making merupakan tahapan dimana decision maker mempertimbangkan faktor domestik dan eksternal sebelum pengambilan kebijakan luar negeri. Proses ini dipengaruhi oleh *policy influencers* yang membentuk *influence system*. *Foreign policy action* (Aksi Kebijakan Luar Negeri) merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan dalam bentuk tindakan, seperti pemberian bantuan kemanusiaan, sanksi ekonomi, intervensi militer, atau diplomasi. Aksi ini mencerminkan kompromi antara kepentingan domestik seperti opini publik dan tekanan politik dengan tuntutan eksternal. Sementara itu, *international context* merupakan lingkungan eksternal yang mencakup situasi politik, keamanan ekonomi, dan hubungan antar negara. Dominasi Taliban di Afghanistan merupakan bagian dari *international context* yang mempengaruhi keputusan AS terkait bantuan kemanusiaan. Pada tahap decision making, aktor utama yang terlibat adalah para pengambil keputusan di tingkat eksekutif, khususnya presiden dan aktor birokrasi yang memiliki kewenangan dalam merumuskan arah kebijakan luar negeri. Proses ini tidak lepas dari pengaruh *policy*

influencers (Departemen Luar Negeri, USAID), *Partisan influencers* (partai politik di Kongres yang mendorong atau menolak kebijakan), *Interest influencers* (LSM, kelompok kepentingan, organisasi internasional dan PBB), serta *Mass influencers* (opini publik, media Amerika dan warga negara AS). Hasil dari proses tersebut kemudian melahirkan *foreign policy action* yang berupa penyaluran bantuan kemanusiaan dan pembangunan di Afghanistan, yang diimplementasikan melalui mekanisme diplomasi, distribusi logistik, maupun program kemitraan. Selanjutnya, kebijakan tersebut berinteraksi dengan international context yakni kondisi politik dan keamanan global, peran negara-negara sekutu, sikap rezim Afghanistan, serta respons dari komunitas internasional yang ikut mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Dengan demikian, terlihat bahwa pengambilan keputusan tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh aktor internasional, sehingga aksi kebijakan luar negeri AS merupakan hasil interaksi antara proses politik internal dengan dinamika global.

Coplin menerangkan bahwa kebijakan luar negeri diperoleh melalui proses politik domestik oleh aktor-aktor domestik. Aktor domestik disebut sebagai *policy influencers*, sementara hubungan interaksi antar aktor dikenal dengan istilah *policy influence system*. Dengan demikian, peran *policy influencers* menjadi penting sebagai faktor pendukung bagi pengambil keputusan (*decisions makers*). Sementara itu, *decision makers* turut memegang peran vital dalam memfasilitasi pengaruh para aktor tersebut dalam ranah politik domestik. Keterkaitan antara *policy influencers* dengan *decision makers* terjadi, dimana masing masing pihak memberikan pengaruh ataupun tanggapan (*feedback*) dengan *decision makers*

sebagai pengambil kebijakannya Mekanisme ini berlaku dalam berbagai sistem pemerintahan. Menurut William D. Coplin, terdapat empat kategori *policy influencer* yang berperan dalam mempengaruhi perumusan dan implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Bureaucratic Influencer*

Bureaucratic influencer merupakan aktor birokrasi yang dapat mempengaruhi pengambil keputusan melalui penyediaan informasi dalam perumusan kebijakan, serta melalui proses administratif ketika kebijakan tersebut diimplementasikan. Aktor-aktor ini mempengaruhi kebijakan melalui jabatan resmi, keahlian teknis, kontrol informasi, dan peran mereka dalam melaksanakan kebijakan. *Bureaucratic Influencer* dalam kasus ini adalah aktor-aktor dalam pemerintah dan birokrasi AS.

2. *Partisan influencer*

Partisan Influencer merupakan aktor yang memiliki pengaruh yang berasal dari partai politik yang berpengaruh terhadap pengambil keputusan kebijakan. Fungsi partai politik yang bertujuan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi tuntutan politik kepada pembuat kebijakan, keberadaan partai politik memang lebih terfokus pada isu-isu politik domestik daripada kebijakan luar negeri. Meskipun demikian, partai politik tetap memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, meski pengaruhnya cenderung terbatas di banyak negara. Dalam kasus ini Partisan influencer adalah Partai Politik AS (Demokrat dan Republik)

3. *Interest influencer*

Merupakan tempat di mana pengaruh kepentingan tertentu memiliki dampak signifikan dalam proses pengambilan kebijakan. Dukungan dari kelompok atau massa yang besar dapat memengaruhi pengambil keputusan maupun *partisan influencers*, terutama dalam konteks memenangkan pemilu di suatu negara. Dalam kasus ini, kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat antara lain :

1. Organisasi Kemanusiaan seperti UNICEF dan World Food Programme (WFP) yang menekankan pemerintah AS agar tetap menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan
  2. Lembaga donor dan sukarelawan dalam hal ini, USAID memiliki kepentingan pada isu kemanusiaan dan pembangunan
  3. Akademisi dimana memberikan masukan kebijakan terkait strategi dalam perumusan kebijakan dalam menghadapi Taliban tanpa mengesampingkan isu kemanusiaan
4. *Mass influencer*

Mass Influencer bersumber langsung dari masyarakat itu sendiri. Sistem politik suatu negara sangat menentukan sejauh mana aspirasi masyarakat diperhitungkan. Di negara dengan sistem politik tertutup, suara masyarakat cenderung diabaikan atau bahkan dimanipulasi untuk mendukung kebijakan luar negeri tertentu, seringkali melalui kontrol pemerintah atas media massa. Sebaliknya, di negara dengan sistem politik terbuka, aspirasi masyarakat lebih bebas disuarakan dan opini publik memiliki peran lebih besar dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Dalam

kerangka Coplin, mass opinion influencer merujuk kepada masyarakat luas dan media yang membentuk persepsi publik

1. Warga Amerika Serikat termasuk sebagai Mass actors, dimana opini publik Amerika Serikat pasca penarikan militer dari Afghanistan menjadi terbagi 2 kubu, dimana sebagian warga Amerika Serikat ingin Amerika Serikat mengurangi keterlibatan di luar negeri dengan tidak memberikan kebijakan bantuan pada Afghanistan, namun terdapat tekanan dari sisi kemanusiaan yang mendorong agar AS tidak membantu rakyat Afghanistan yang berada di bawah Taliban.
2. Media Amerika seperti New York Times, CNN, Fox News berperan memperkuat framing isu media terpecah-pecah, ada media yang menekan sisi kemanusiaan, ada juga yang menekan bahaya memberikan legitimasi pada Taliban.
3. Opini publik internasional, meskipun berpengaruh kecil dibanding warga AS, masyarakat global memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk citra AS, terutama melalui sorotan media internasional dan PBB.

Dalam kasus ini masyarakat AS melarang keras adanya rezim taliban karena membawa dampak negatif bagi masyarakat Afghanistan. Namun, AS masih perlu opini publik yang kuat, yaitu dilakukan melalui pemberian bantuan kemanusiaan yang disalurkan kepada organisasi Internasional. Organisasi kemanusiaan internasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat mempengaruhi keputusan pemerintah terkait bantuan kemanusiaan.

Kelompok-kelompok tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda, seperti penyaluran bantuan secara langsung ke rakyat Afghanistan tanpa memperkuat kekuasaan Taliban atau memastikan adanya akuntabilitas distribusi bantuan.

Proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri juga melibatkan birokrasi pemerintah yang memiliki kewenangan. Coplin menekankan bahwa lembaga pemerintah tidak bertindak sebagai satu kesatuan yang homogen, namun memiliki perspektif, dan prioritas. Dalam kasus Amerika Serikat, terdapat aktor birokratik utama seperti Departemen Luar Negeri, USAID, Departemen Pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional. Departemen Luar Negeri cenderung mengutamakan stabilitas kawasan, sementara Departemen Pertahanan berfokus pada keamanan serta strategi militer. USAID sendiri memprioritaskan efektivitas distribusi bantuan, sedangkan Dewan Keamanan Nasional bertugas memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan strategi keamanan nasional. Perbedaan prioritas ini kerap memunculkan negosiasi intensif, bahkan konflik kebijakan sebelum menghasilkan keputusan akhir yang disepakati bersama.

Lingkungan global juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Coplin memandang hubungan antar negara, aliansi strategis, norma internasional, dan tekanan organisasi global sebagai faktor yang membentuk pilihan kebijakan suatu negara. Misalnya, Amerika Serikat berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga internasional lainnya untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan ke Afghanistan disalurkan dengan cara yang transparan dan tidak memperkuat kendali Taliban atas wilayahnya. Peran organisasi internasional juga penting untuk

menyeimbangkan kepentingan berbagai aktor global yang terlibat baik negara pendonor maupun lembaga kemanusiaan.

Kapabilitas ekonomi dan kekuatan militer suatu negara turut menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, dimana Coplin menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh sejauh mana sumber daya ekonomi dan militer dapat digunakan untuk mencapai tujuan politik luar negeri. Amerika Serikat sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia memiliki kemampuan lebih besar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, sekaligus tetap memberlakukan sanksi terhadap Taliban untuk menekan ruang kelompok tersebut. Pendapat ini sejalan juga dengan pandangan dalam penelitian terdahulu (Renshon dan Renshon 2008) yang menyebutkan bahwa kapabilitas ekonomi dan militer merupakan salah satu komponen yang signifikan dalam mendukung kebijakan luar negeri dalam suatu negara.

Penelitian ini berfokus pada kebijakan bantuan kemanusiaan internasional yang diberikan untuk Afghanistan, terutama ketika Taliban mengambil alih kekuasaan. Penyaluran yang dilakukan melalui pemerintah Taliban justru memperkuat kelompok tersebut dalam mengendalikan wilayah dan populasi Afghanistan. Kondisi ini menciptakan tantangan baru bagi masyarakat internasional, khususnya Amerika Serikat karena bantuan kemanusiaan yang dimaksudkan untuk menolong masyarakat sipil justru berpotensi memperkuat kekuasaan Taliban (Luerdi 2022).

Dalam teori ini juga menekankan bahwa terdapat tiga indikator utama dalam variabel kebijakan luar negeri, yaitu faktor geografis, ekonomi dan politik (Salih Emir Mutluer 2020). Faktor geografis meliputi posisi strategis Afghanistan yang

berbatasan dengan negara-negara penting di Asia Selatan dan Asia Tengah, yang menjadikannya wilayah sensitif akan pengaruh kekuatan global. Faktor ekonomi terkait dengan sumber daya alam, dimana tingkat kemiskinan dan ketergantungan dalam bantuan internasional membentuk dinamika kebijakan di wilayah tersebut. Faktor politik, yang berhubungan dengan perebutan kekuasaan dan konflik kepentingan antar aktor baik domestik maupun internasional. Ketiga faktor ini mempunyai relevansi dalam memahami konflik antara Amerika Serikat dan Taliban, dimana tujuan utama Amerika Serikat adalah mencegah Taliban menguasai Afghanistan karena dianggap sebagai kelompok teroris dan bertentangan dengan prinsip kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

### **1.7 Argumen Sementara**

Dominasi rezim Taliban merupakan tantangan yang besar bagi pemerintah Amerika Serikat terutama dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan luar negeri Amerika. Di satu sisi Amerika Serikat mencoba memberikan bantuan berupa bantuan kemanusiaan untuk mencegah krisis dan membentuk opini publik akan kepedulian Amerika Serikat terhadap Afghanistan yang berada di bawah kendali serta memperkuat politik di Asia Tengah. Namun, di sisi lain penyaluran bantuan tersebut menjadi suatu permasalahan, karena dengan bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat dapat memberikan kekuatan Taliban terutama dalam memperkuat legitimasi Taliban di Afghanistan sebagai rezim pemimpin. Hal ini menimbulkan dilema bagi Amerika Serikat, dimana proses pengambilan keputusan tidak lepas dari tekanan politik dalam negeri, seperti kepentingan pemerintah, pandangan Kongres, opini publik yang sensitif atas isu kemanusiaan, serta kepentingan

strategis Amerika Serikat di kawasan Asia Tengah. Faktor Domestik ini mendorong Amerika Serikat agar tetap hadir secara politik melalui bantuan walaupun dengan syarat ketat. Berdasarkan teori Coplin, keputusan luar negeri Amerika Serikat lahir dari pertimbangan *trade-off* antara kepentingan politik luar negeri, tekanan domestik serta kondisi eksternal.

Berdasarkan teori Coplin, keputusan ini dapat dianalisis melalui peran empat kategori *policy influencer*. *Bureaucratic influencers* memberikan arahan dan informasi yang membentuk strategi penyaluran bantuan, Partisan influencers mendorong pengambilan keputusan agar kebijakan sejalan dengan kepentingan politik dan pemilu. *Interest influencers* menekan melalui dukungan kelompok untuk menjaga pengaruh politik tanpa memperkuat Taliban. Sementara itu, *Mass influencers* memanfaatkan opini publik dan media untuk mempengaruhi arah kebijakan, menuntut adanya solusi yang tetap menjaga citra kemanusiaan. Dengan begitu, pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Afghanistan terlihat sebagai hasil trade-off antara tekanan domestik, kepentingan politik luar negeri, dan kondisi eksternal, dimana Amerika Serikat memilih jalur bantuan kemanusiaan melalui lembaga internasional agar bisa menjaga citra tanpa memperkuat Taliban.

Argumen sementara dalam penelitian ini adalah bahwa dualitas kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Taliban memberikan bantuan kemanusiaan sambil menerapkan sanksi—menciptakan dilema yang mendalam dalam pengelolaan bantuan internasional. Dalam konteks Afghanistan, Taliban memanfaatkan bantuan internasional untuk menguatkan posisi mereka di tingkat lokal dan membangun legitimasi, sementara sanksi yang diterapkan Amerika

Serikat bertujuan untuk mengurangi kekuatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun Amerika Serikat berusaha mencegah krisis kemanusiaan dengan memberikan bantuan, penerapan sanksi yang bersamaan berpotensi memperburuk ketegangan dan memperumit stabilitas regional.

Sehingga argumen sementara peneliti yaitu bahwa Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden terus melanjutkan kebijakan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan sebagai respons terhadap pengaruh faktor eksternal, dimana Amerika Serikat sebagai negara donor tetap penting dan untuk mencegah ketidakstabilan politik di Afghanistan di bawah rezim Taliban setelah penarikan militer Amerika Serikat secara penuh. Di sisi domestik, pemerintahan Amerika Serikat dipengaruhi oleh dua faktor yang pertama, persepsi terhadap Joe Biden sebagai pemimpin yang ingin meninggalkan kesan positif setelah penarikan militer Amerika Serikat dan kedua, tekanan dari oposisi yang khawatir kebijakan penarikan akan menyebabkan kekacauan. Dengan demikian, pemerintahan Biden berupaya agar bantuan kemanusiaan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Afghanistan dibandingkan dengan rezim Taliban yang dianggap tidak memiliki integritas pemerintahan yang baik, sehingga meningkatkan citra Amerika Serikat di dunia internasional dan mempertahankan hegemoni di Afghanistan.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu sebuah metode yang akan berfokus pada pemahaman mendalam atas fenomena sosial melalui analisis deskriptif, dimana hasil dari penelitian ini tidak ditentukan

dalam bentuk angka melainkan berdasarkan sumber data yang tentunya relevan dan kredibel dengan penelitian penulis.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Amerika Serikat adapun objek yang diteliti adalah bantuan kemanusiaan Amerika Serikat atas Afghanistan khususnya pada pemerintahan Taliban.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yang mana artinya penelitian ini mengambil bahan berdasarkan media yang telah terpublikasikan sebelumnya, seperti jurnal, berita, buku hingga artikel yang sudah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Pada penelitian ini penulis mengambil data dari berbagai literatur yang sudah disebutkan sebelumnya, dari data-data yang sudah terkumpul penulis akan membaca dengan tujuan bisa memahami secara menyeluruh terkait data yang layak digunakan dan tidak dalam penelitian ini. Setelah itu penulis akan melakukan pembagian sub-topik berdasarkan data yang telah terkumpul, yang setelah itu di tahap terakhir penulis akan memaparkan kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini terdapat empat bab yang akan dibahas oleh penulis, pada bab pertama sendiri terdiri dari latar belakang dimana penulis akan membahas mengenai dinamika bantuan kemanusiaan internasional di masa pemerintahan

Taliban di Afghanistan. Lalu, pada bab kedua penulis akan memaparkan definisi seperti apa bantuan kemanusiaan internasional dari Amerika Serikat yang diterima oleh pemerintahan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban. Kemudian pada bab ketiga akan menjelaskan mengenai analisis bagaimana bantuan kemanusiaan internasional dari Amerika Serikat ke Afghanistan yang dikelola di bawah rezim internasional. Pada bab terakhir yakni bab keempat yang merupakan bab penutup dimana pada bab ini penulis akan menjelaskan poin penting sebagai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB 2**

### **BANTUAN KEMANUSIAAN AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN SAAT ERA TALIBAN**

Dalam konteks hubungan internasional dan dinamika geopolitik global keterlibatan Amerika Serikat di Afghanistan selama kekuasaan Taliban merupakan salah satu bagian penting yang penuh dengan kompleksitas. Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah bentuk serta arah bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Afghanistan di tengah situasi politik yang tidak menentu dan penuh ketegangan. Pada sub-bab ini akan membahas bagaimana bantuan tersebut disalurkan, apa tantangan yang dihadapi dalam proses pendistribusiannya, serta bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat sipil Afghanistan. Penjabaran ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi bagaimana kekuatan besar dunia menjalankan diplomasi kemanusiaan dalam situasi yang penuh ambiguitas.

#### **2.1. Krisis kemanusiaan di Afghanistan di masa Taliban (2021-2024)**

Fenomena krisis kemanusiaan terus muncul dari masa ke masa, yang mana fenomena ini tetap berlangsung hingga saat ini. Krisis kemanusiaan sendiri adalah sebuah keadaan dimana ada hak-hak dasar untuk para individu yang tidak mereka dapatkan. Kata dari 'krisis' sendiri mengarah terhadap keadaan penurunan yang mengkhawatirkan, sedangkan untuk kata 'kemanusiaan' secara manusia atau sebagai manusia, yang mana jika digabungkan dua kata tersebut diartikan keadaan dimana manusia sedang berada dalam situasi yang tidak aman dimana mereka tidak

mendapatkan kehidupan yang tentram dan damai yang mana sebenarnya berhak didapatkan oleh setiap individu. Kasus krisis kemanusiaan tentunya banyak terjadi di negara yang ada di dunia ini, yang mana hal ini terus terjadi akan mengkhawatirkan. Terjadinya krisis kemanusiaan yang meluas di lingkup dunia pada abad ke-21 ini merupakan sebuah permasalahan yang tentunya menjadi sebuah tantangan dunia global saat ini (Dewi dan Utari 2022).

Adapun hak-hak yang dimaksud ialah hak hidup, hak agar memperoleh keadilan, dan hak untuk mendapatkan rasa aman. Krisis kemanusiaan ini disebabkan karena adanya faktor permasalahan di lingkungan yang kerap mengalami konflik, beberapa contoh konflik yang dimaksud contohnya, adanya perbedaan ras, etnis, ataupun dalam perbedaan agama dan budaya. Faktor lainnya adalah dimana pemerintah di suatu negara tidak memiliki keinginan untuk mengatasi konflik yang terjadi di negara itu. Dalam krisis kemanusiaan ini tentu ada dampak yang ditimbulkan yang mana hal ini berkaitan juga dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dimana muncul beberapa pelanggaran HAM, seperti terjadi penganiayaan serta kekerasan dan ketidakmampuan individu untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia (Sriram dkk. 2010). Namun, jika pemerintah pada suatu negara tidak memiliki tekad dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara mereka tentu akan menimbulkan krisis kemanusiaan yang akan berkembang pesat yang tentunya akan menimbulkan dampak di sekitar terhadap suatu etnis khusus. Tetapi, eksistensi sebuah etnis kerap menimbulkan permasalahan dimana sebuah etnis memerlukan validasi dari pihak tertentu agar etnis tersebut memiliki ciri khas tersendiri, dimana jika suatu etnis tidak

mendapatkan validasi yang mereka harapkan tentunya akan menimbulkan rasa takut hingga merasa terancam.

Afghanistan adalah negara yang terletak di persimpangan Asia Tengah yang merupakan negara yang mana mayoritas individunya beragama Islam yang diperkirakan sekitar 99,7% dan sisanya adalah penganut Sunni dan Syiah. Selain itu negara ini mempunyai latar belakang dimana harapan hidup untuk wanita dan pria adalah 53,6 untuk wanita, sedangkan untuk pria 50,6. Taliban sendiri adalah sebuah kelompok yang berisikan kaum santri, yang mana kelompok ini dianggap gerakan dari Islamis fundamentalis yang berakar dari negara Pakistan. Kelompok ini juga sudah berhasil merebut kekuasaan di Afghanistan sejak tahun 1996 sampai 2001 setelah berhasil melakukan aksi pemberontakan selama 20 tahun, dimana kelompok ini sukses menguasai hingga 90 persen kekuasaan di Afghanistan (Salsabila 2023). Sejak dari itu Taliban sudah berhasil mengendalikan 4 kota yang berada di Afghanistan yaitu Herat, Kandahar, Jalalabad dan Kabul.

Pada tahun 2001 Taliban berhasil menggulingkan rezim asli setelah invasi di Afghanistan. Pada tahun 1995, Taliban berhasil merebut kekuasaan di Afghanistan Selatan, lalu melanjutkan aksinya ini karena mendapatkan dukungan kelompok etnis Pashtun serta mendapat bantuan dari beberapa unsur Islam konservatif di luar negeri. Dilanjut pada Agustus tahun 2021, Taliban juga berhasil mengambil alih beberapa kota besar, termasuk salah satunya adalah ibu kota dari Kabul. Taliban awalnya dikenal penguasa yang represif yang mana menimbulkan penindasan dengan periode yang sangat lama terutama terhadap perempuan. Pada tahun 2021 Taliban sempat berjanji dengan memberikan hak terhadap perempuan dengan memberikan akses agar perempuan bisa mengakses pendidikan, dan

berjanji akan menghormati hak-hak lain untuk para perempuan. Beberapa penjelasan mengenai Taliban ini tentunya berlawanan dengan Afghanistan, dimana Afghanistan ialah negara yang masih memperjuangkan dalam mengembalikan hak-hak untuk kesetaraan perempuan, dimana yang menjadi konflik utama adalah diskriminasi (Irsya dan Ibnu 2023) .

Afghanistan tentunya sudah sangat lama mengalami kejahatan oleh konflik yang tak ada ujungnya yang dilakukan oleh Taliban, dimana para rakyatnya telah merasakan perang dan dianggap menjadi kelompok yang rentan khususnya pada golongan anak-anak dan wanita. Tindakan yang dilakukan oleh Taliban terhadap Afghanistan tentunya menarik perhatian dunia yang mengkhawatirkan kondisi serta masa depan dari Afghanistan yang mana saat dikuasai Taliban (Khan dan Durrani 2024).

## **2.2. Dampak Penarikan Militer AS dari Afghanistan**

Awal mula kedatangan pasukan militer Amerika Serikat ke Afghanistan dimulai pada tahun 2001 dimana kedatangan mereka adalah untuk menjadi bagian dari “perang melawan teror” guna membasmi jaringan Al-Qaeda yaitu sebuah kelompok yang menganut paham terorisme, dimana kelompok ini juga menjadi sasaran pasukan militer Amerika Serikat untuk dibasmi karena mereka melakukan aksi pemboman pada menara kembar di New York (Republika 2021), alasan lainnya dimana Amerika Serikat ingin menjaga perdamaian global. Setelah terjadinya banyak peperangan selama hampir 18 tahun antara kelompok Taliban dengan pasukan militer Amerika Serikat, akhirnya Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan setelah adanya perjanjian perdamaian Doha dimana pasukan militer

Amerika Serikat diberikan waktu 14 bulan untuk pergi, yang mana mereka resmi pergi pada Mei 2021 (Akram dan Akbar 2023).

Amerika Serikat sendiri mempunyai peran yang cukup berpengaruh di Afghanistan, hampir pada semua aspek maupun peristiwa yang terjadi di Afghanistan terutama yang berkaitan dengan isu konflik dan militer pasti Amerika Serikat mempunyai peran di dalamnya (Sawal dkk. 2022). Banyaknya konflik yang terjadi tentu berdampak pada masyarakat Afghanistan, dimana ketika penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan pada tahun 2021 tentunya menimbulkan dampak yang signifikan pada berbagai aspek di negara tersebut. Secara politik, penarikan ini menyebabkan perubahan drastis dalam struktur kekuasaan di Afghanistan. Tanpa kehadiran militer AS dan dukungan internasional, pemerintah Afghanistan yang didukung AS mengalami keruntuhan cepat, yang diikuti dengan pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Hal ini memunculkan kekhawatiran global terkait potensi Afghanistan kembali menjadi sarang bagi kelompok-kelompok ekstremis dan militan, yang berpotensi mengancam stabilitas regional maupun global. Dimana awalnya pasukan militer Amerika Serikat yang berada di Afghanistan melakukan sengketa bersenjata dengan alasan untuk membasmi organisasi yang memiliki ciri seperti terorisme, tetapi pada proses pembasmian tersebut banyak pasukan tentara dari Amerika Serikat yang gugur pada medan sengketa tidak hanya tentara dari pasukan Amerika Serikat, banyak korban yang gugur juga dari masyarakat sipil saat perang (Dewi dan Utari 2022).

Dalam perspektif ekonomi dari dampak penarikan pasukan militer Amerika Serikat salah satunya adalah adanya pembekuan atas aset nasional Afghanistan yang berada dibawah Amerika Serikat, akibatnya membuat masyarakat kesulitan

dalam mengaksesnya terhadap perekonomian, tidak hanya itu terjadi juga pembekuan aset terhadap kredensial yang dilakukan Amerika Serikat yang mana hal ini menyebabkan gangguan ekonomi di Afghanistan, salah satu dampaknya ialah sekitar 93% masyarakatnya mengalami kerawanan dalam pangan yang parah. Dampak lain yang ditimbulkan juga dimana sulitnya bantuan internasional dicairkan dimana bantuan berupa pendanaan ini untuk didistribusikan untuk stabilisasi ulang perekonomian (Putra 2023).

Pada awal kedatangan pasukan militer dari Amerika Serikat mereka sudah melakukan kerjasama bersama pemerintah di Afghanistan guna merealisasikan pemberantasan terhadap organisasi yang bersifat terorisme yang ada di Afghanistan. Beberapa upaya yang dilakukan salah satunya dengan melatih para tentara di pasukan Afghanistan agar dapat melawan kelompok seperti ISIS. Akhirnya pada Februari 2021 Amerika Serikat bersama Taliban merilis kesepakatan dimana kesepakatan tersebut mengenai perdamaian di Afghanistan, Amerika Serikat setuju agar menarik pasukannya dengan syarat dimana Taliban tidak membiarkan kelompok yang memiliki paham terorisme atau sejenisnya berkeliaran di kawasan negara Afghanistan, tidak hanya itu Taliban juga dilarang menyerang dalam bentuk apapun ke pasukan militer Amerika Serikat. Setelah perjanjian tersebut disepakati para pasukan militer Amerika Serikat meninggalkan kawasan Afghanistan namun tentunya kepergian pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan membawa dampak yang signifikan khususnya pada kasus Hak Asasi Manusia dan hak para perempuan di Afghanistan, dimana kelompok Taliban tetap berambisi untuk mengambil alih kekuasaan atas Afghanistan dimana saat Amerika Serikat berkuasa atas Afghanistan, pemerintah Afghanistan perlahan

akhirnya memberlakukan asas demokrasi, tidak hanya itu hak-hak kemanusiaan dan hak para perempuan mulai disorot dan diperhatikan. Meskipun belum terlalu banyak hak-hak lain yang diperhatikan, tetapi banyak sekali para perempuan di Afghanistan yang merasakan kembali hak mereka yang mana ketika Taliban mengambil alih kekuasaan mereka membuat hak tersebut tidak berlaku (Joito Banjarnahor 2025).

Kepergian pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan juga membuat kelompok Taliban tetap melakukan berbagai jenis teror di Afghanistan tidak hanya itu Taliban juga mengembalikan pasukan-pasukan bersifat terorisme seperti ISIS dan Al-Qaeda yang tentunya memberikan ketidaknyamanan masyarakat sipil khususnya pada kota Kabul. Jenis teror yang terjadi mulai dari pembunuhan yang terjadi pada masyarakat sipil yang mana hal ini dilakukan sebagai bentuk balas dendam karena mereka dianggap membantu pasukan militer Amerika Serikat saat berkuasa di Afghanistan, selain itu karena bangkitnya kelompok paham terorisme terjadi juga kasus peledakan bom salah satunya peledakan bom yang terjadi di rumah sakit militer Sardar Mohammad Baud Khan, yang mana pada kejadian ini menelan sebanyak 19 orang masyarakat sipil.

### **2.3. Keberlanjutan Komitmen AS dalam bantuan kemanusiaan**

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, perekonomian di Afghanistan masih sangat bergantung dengan bantuan internasional, dimana hal ini dikuatkan dengan data dari Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan yang dapat disebut SIGAR, pada laporan data mereka tercatat dimana 75% pengeluaran dari pemerintah Afghanistan didapatkan dari bantuan Internasional. Selama hampir 20 tahun berjalan tentu terdapat banyak bantuan-bantuan luar negeri yang terus

didapatkan oleh Afghanistan dan selalu meningkat setiap tahunnya misalnya seperti bantuan dalam tenaga maupun alat medis, pembangunan dalam ekonomi dan pembangunan dalam infrastruktur untuk masyarakat Afghanistan. Bantuan lain yang didapatkan Afghanistan juga ada dalam hal pendidikan dan kesehatan yang mana sekolah dan rumah sakit dapat lebih mudah diakses untuk para masyarakat Afghanistan. Dengan adanya bantuan tersebut tentunya Afghanistan setidaknya mendapatkan sedikit rasa aman dan lebih tercukupi karena sebelumnya sulit merasakan beberapa hak yang tidak dapat diakses (Sahputra dkk. 2022). Salah satu program dari Amerika Serikat yang mengusung untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan adalah PROMOTE atau kepanjangan dari Promoting Gender Equality In National Priority Programs, yang mana program ini telah diresmikan secara langsung oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID sejak tahun 2014, tujuan utama diadakannya program ini adalah untuk memberikan dukungan serta bantuan terkait permasalahan gender di Afghanistan.

Dana yang dianggarkan Amerika Serikat melalui program ini mencapai 280 juta dolar AS yang mana sekitar 75.000 perempuan di Afghanistan di targetkan untuk menerima bantuan ini dengan fokus agar mereka mendapatkan pelatihan kerja dan pekerjaan yang sesuai (The New York Times 2018). Program lain yang dibentuk oleh Amerika Serikat untuk membantu masyarakat sipil di Afghanistan yakni Food for Peace (FFP), program bantuan ini sudah didirikan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1954 oleh presiden Dwight E. Eisenhower namun Afghanistan mulai menjadi salah satu negara penerima bantuan program ini secara signifikan dimulai pada tahun 2000-an. Program ini berfokus pada bantuan pangan darurat

yang menargetkan masyarakat yang terdampak kekeringan akibat konflik. Amerika Serikat menyalurkan bahan pangan mereka melalui organisasi seperti World Food Programme (WFP) agar dapat menjangkau wilayah yang paling terdampak (Sida dan Nelis 2022).

Amerika Serikat menjadi negara yang memberikan banyak bantuan lain terhadap Afghanistan ketika dibawah kuasa Taliban, bantuan yang diberikan pun ada bermacam macam, diantaranya dalam bentuk dukungan keamanan, Amerika Serikat tercatat mengalokasikan sekitar \$4,8 miliar per tahun untuk memenuhi kebutuhan keamanan di Afghanistan yang mana hal ini juga mencakup dalam memberikan pelatihan, dukungan strategis dan logistik untuk angkatan pertahanan dan keamanan nasional Afghanistan. Setidaknya selama 20 tahun belakangan Amerika Serikat tercatat mengeluarkan sekitar \$145 miliar USD guna membantu aspek ekonomi dan sosial di Afghanistan, disamping itu departemen pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan setidaknya \$837 miliar USD dalam konflik panjang (Sahputra dkk. 2022a).

Amerika Serikat juga terlibat dalam bantuan rekonstruksi dan pembangunan infrastruktur di Afghanistan setelah mengalahkan kelompok Taliban bantuan ini termasuk mengadopsi konstitusi baru dan penyelenggaraan pemilihan presiden. Selain itu, Amerika Serikat juga aktif terlibat dalam operasi militer dan penanggulangan terorisme guna mencegah kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan Taliban yang mana kelompok ini memberikan ancaman terhadap keamanan regional maupun global. Amerika Serikat juga memberikan bantuannya dalam berupa dukungan kepada Afghan National Defense and Forces (ANDSF) guna memastikan keamanan di berbagai instansi penting di Afghanistan. Dari berbagai

bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Afghanistan ini mempunyai tujuan dimana agar terciptanya stabilitas serta keamanan di Afghanistan, walaupun tentunya ada tantangan tersendiri yang terus berlanjut dalam mewujudkannya (Dr. Muhammad Tariq dkk. 2021).

Setelah peristiwa penarikan pasukan militer AS dari Afghanistan di tahun 2021, tentunya Amerika Serikat mempunyai tantangan baru dalam mempertahankan komitmen mereka untuk memberikan bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan, dimana negara ini sangat bergantung pada bantuan eksternal akibat dari konflik yang terjadi selama bertahun-tahun. Meskipun Amerika Serikat sudah menarik pasukannya, namun komitmen Amerika Serikat dalam memberikan bantuan kemanusiaan tetap menjadi salah satu isu yang penting, mengingat kondisi yang krisis dihadapi masyarakat Afghanistan. Keputusan Amerika Serikat dalam terus memberikan bantuan bahkan setelah penarikan pasukan militer memperlihatkan bahwa Amerika Serikat ingin tetap mempertahankan tanggung jawab moralnya terhadap masyarakat Afghanistan. Hal ini terlihat di tengah kekhawatiran dimana sanksi terhadap kelompok Taliban akan berdampak buruk dalam krisis kemanusiaan yang berkelanjutan pada negara yang terlibat pada konflik tersebut (DetikNews 2021).

Keberlanjutan bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat untuk Afghanistan tentunya tidak terlepas dari adanya tantangan dalam pendistribusiannya, salah satunya dimana sanksi yang dikenakan terhadap Taliban tentunya membatasi akses dana dan menghambat pendistribusian bantuan di Afghanistan. Situasi ini tentu menimbulkan kendala operasional bagi lembaga bantuan Amerika Serikat yang harus menavigasi regulasi yang ketat untuk

memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tidak diberikan kepada kelompok yang semestinya tidak berhak menerimanya. Pada bulan Desember tahun 2021, pemerintah Amerika Serikat memperluas otoritas agar dapat memantau pendistribusian bantuan kemanusiaan yang mereka berikan terhadap Afghanistan dimana dengan memperluas otoritas dimana PBB atau lembaga bantuan pemerintah Amerika Serikat akan mempunyai hak dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan tanpa adanya pelanggaran sanksi atas Taliban (Sahputra dkk. 2022b). Dalam kondisi seperti ini Amerika Serikat perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih fleksibel untuk memfasilitasi penyaluran bantuan sehingga sanksi terhadap Taliban tidak menjadi penghalang utama dalam upaya membantu Afghanistan.

Sebagai negara yang selalu aktif dalam mengupayakan stabilitas keamanan di Afghanistan tetap terjaga, Amerika Serikat pun akhirnya mengubah strateginya dengan alih-alih menghentikan segala jenis invasi serta bersedia membuat perjanjian perdamaian bersama kelompok Taliban. Perjanjian tersebut mempunyai beberapa poin yang harus disepakati antara Amerika Serikat maupun kelompok Taliban itu sendiri yaitu yang pertama melakukan aksi gencatan senjata, yang kedua menjadikan Afghanistan sebagai kawasan yang memiliki rasa aman dan bebas dari teror dari kelompok-kelompok lain agar tidak merusak stabilitas keamanan di Afghanistan, Amerika Serikat dan sekutunya, yang ketiga upaya penarikan pasukan militer Amerika Serikat dan sekutunya secara bertahap, lalu yang terakhir yakni negosiasi intra-Afghanistan untuk membahas secara komprehensif keamanan di Afghanistan. Melalui pembentukan perjanjian ini diharapkan Afghanistan bersama dengan para pejabat dan pemerintahan dapat meningkatkan kemampuan lembaga

serta pemberdayaan masyarakat Afghanistan dengan proses yang demokratis yang tentunya Amerika Serikat menyalurkan bantuannya melalui USAID yang sama sama bergerak di sektor pemerintahan (Sahputra dkk. 2022).

### **BAB 3**

#### **PERTIMBANGAN AMERIKA SERIKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN DI AFGHANISTAN SAAT MASA TALIBAN**

Amerika Serikat menghadapi dilema besar antara mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM dengan realitas pragmatis di lapangan. Pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan pengakuan diplomatik terhadap rezim Taliban, membekukan cadangan mata uang asing Afghanistan senilai sekitar 7 miliar US Dolar, dan tetap memberlakukan sanksi terhadap para pemimpin Taliban (Bateman 2023). Disisi lain, Amerika Serikat menyadari bahwa penangguhan bantuan sepenuhnya berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan, sehingga pemerintah tetap menjadi pendonor bantuan terbesar untuk Afghanistan. Berbagai opsi kebijakan dirumuskan termasuk menyalurkan bantuan melalui lembaga global seperti UNICEF, WFP dan PBB, akan mengurangi hambatan untuk distribusi bantuan ke masyarakat sipil .

Pilihan kebijakan spesifik yang dikembangkan Amerika Serikat antara lain : (1) Menyalurkan humanitarian aid non-tunai melalui mekanisme PBB dan NGO, (2) Melonggarkan sebagian sanksi finansial agar ekonomi Afghanistan tetap mempunyai akses atas pasar global, (3) Mempertahankan tekanan politik guna menekan pelanggaran HAM untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan efektif (Bateman 2023).

### **3.1. Politik Domestik**

Perubahan kekuasaan ini membuat beberapa organisasi internasional serta negara donatur ragu dalam memberikan bantuan secara langsung kepada pemerintah Afghanistan karena adanya kekhawatiran atas hak asasi manusia, terutama terhadap kelompok perempuan dan minoritas. Kontrol ketat kelompok Taliban atas jalur distribusi bantuan menimbulkan kekhawatiran bahwa bantuan tidak akan disalurkan secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan, melainkan dimanfaatkan untuk memperkuat legitimasi politik. Akibatnya, sebagian besar bantuan kemanusiaan dialihkan melalui organisasi internasional bukan melalui pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa situasi politik domestik Afghanistan mempengaruhi kepada siapa, bagaimana dan seberapa besar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara efektif.

Politik Domestik menurut sudut pandang Coplin merupakan sebuah faktor internal di dalam suatu negara yang mencakup partai politik, parlemen, kelompok kepentingan, media, dan opini publik, yang mana semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri (Blankshain 2019). Secara lebih dalam, Coplin menekankan bahwa keputusan politik internasional bukan semata-mata ditentukan oleh logika strategis atau pertimbangan eksternal, namun keputusan tersebut dapat dipengaruhi juga oleh dinamika internal atas negara tersebut, seperti stabilitas politik, kekuatan ekonomi domestik serta tekanan dari kelompok kepentingan yang mempunyai kekuasaan atas isu internasional tertentu. Pada konteks Afghanistan, runtuhnya rezim komunis pada awal 1990-an memicu ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Meskipun Afghanistan pernah mengadopsi sistem republik presidensial dengan konstitusi berbasis prinsip Islam,

berbagai konflik internal dan perang saudara antar fraksi menyebabkan kegagalan dalam membangun pemerintahan yang stabil. (Gibson 2015).

Dalam konteks bantuan kemanusiaan, Amerika Serikat menjadi salah satu aktor internasional paling berpengaruh, dimana selama dua dekade Amerika Serikat menjadi penopang utama ekonomi Afghanistan melalui bantuan kemanusiaan dan program rekonstruksi. Meskipun pasukan militer Amerika Serikat ditarik, anggota kongres tetap menyetujui pemberian bantuan dalam jumlah signifikan untuk meringankan dampak krisis kemanusiaan dan ekonomi (VOA 2022). Senat Amerika Serikat umumnya mempunyai pandangan yang terbagi, tetapi secara keseluruhan masih menunjukkan dukungan atas pemberian bantuan kemanusiaan ke Afghanistan, terutama setelah penarikan pasukan militer Amerika Serikat dan kembalinya kekuasaan Taliban pada tahun 2021 (Shahnan dan Hussain 2024). Namun, proses penyaluran bantuan dilakukan secara hati-hati, dimana mayoritas dana disalurkan melalui lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Pada tahun fiskal 2022, Kongres Amerika Serikat menyetujui anggaran sekitar 136 Juta US Dolar untuk mendukung ekonomi Afghanistan dan 52,3 Juta US Dolar untuk program rekonstruksi (ANTARA 2021). Sejumlah organisasi internasional yang menjadi perantara utama penyaluran bantuan yakni USAID, World Food Programme (WFP), UNICEF, yang berfokus dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, perlindungan anak dan dukungan untuk para pengungsi (Sida dan Nelis 2022).

Di tingkat Legislatif, Senat Amerika Serikat menunjukkan pandangan yang terbagi mengenai arah kebijakan bantuan ke Afghanistan, meskipun secara umum

mendukung keberlanjutan bantuan kemanusiaan, terutama pasca-penarikan pasukan militer dan kembalinya kekuasaan Taliban pada 2021 (Shahnan dan Hussain 2024). Laporan dari staf Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS, yang mayoritas berasal dari Partai Demokrat, menegaskan bahwa pengaturan distribusi bantuan perlu dilakukan secara hati-hati untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan data, termasuk potensi perdagangan narkoba (Smith 2011). Pandangan ini menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tidak boleh diberikan langsung ke pemerintah Taliban melainkan melalui organisasi internasional yang terpercaya.

Perdebatan politik domestik di Amerika Serikat juga turut mempengaruhi arah kebijakan luar negeri terhadap Afghanistan. Congressional Research Service (Thomas 2025) menyoroti adanya ketegangan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah kebijakan pasca Taliban. Dari kubu Partai Republik anggota Kongres Rep. Michael McCaul (R-Texas) secara terbuka mengkritik kebijakan presiden Biden yang dinilai terlalu cepat memberikan bantuan tanpa menuntut akuntabilitas Taliban, khususnya terkait isu pelanggaran hak-hak perempuan dan kelompok minoritas (Copp 2024). Sementara itu, Partai Demokrat cenderung mendukung pendekatan moderat dengan menekankan keseimbangan antara tekanan politik terhadap Taliban dan tanggung jawab kemanusiaan, dimana bantuan disalurkan melalui PBB dan NGO tanpa membuka akses diplomatik langsung dengan kelompok Taliban (Bennett 2021).

### 3.2. Kapabilitas Militer dan Ekonomi

Menurut (Dobbins dkk. 2022) strategi Amerika Serikat menekankan keterlibatan terbatas atau *limited engagement* sebagai bagian dari mitigasi risiko. Pendekatan ini mengutamakan diplomasi, kerjasama intelijen dan pengurangan sanksi secara selektif untuk mencegah keruntuhan ekonomi dan menjaga stabilitas kemanusiaan. Analisis disini menjelaskan bahwa intervensi militer penuh justru dapat memicu eskalasi konflik dan memperburuk kondisi masyarakat sipil. Pendekatan berbasis “keseimbangan tekanan dan bantuan” ini mencerminkan kebijakan strategis Amerika Serikat dalam mempertahankan pengaruh geopolitik sekaligus meminimalkan beban keuangan negara.

Strategi keterlibatan terbatas yang dilakukan Amerika Serikat di Afghanistan juga mencerminkan orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara lebih luas. Pendekatan diplomasi, pembatasan intervensi militer, serta pengelolaan sanksi ekonomi selektif menjadi bagian dari upaya mempertahankan keseimbangan antara kepentingan kemanusiaan dan stabilitas geopolitik. Konsep ini relevan ketika membahas kapabilitas militer dan ekonomi Amerika Serikat, karena keputusan mengenai keterlibatan pada suatu konflik internasional tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kemanusiaan, tetapi juga mempertimbangkan kekuatan militer dan ketahanan ekonomi nasional (Dobbins dkk. 2022).

Semakin tinggi kapabilitas militer di suatu negara, tentunya akan semakin besar peluang untuk mempertahankan kedaulatan, dan menghalangi ancaman eksternal. Lalu untuk kapabilitas ekonomi sendiri merujuk kepada ketahanan suatu negara dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan stabilitas nasional. Pada konteks bab ini

akan menjelaskan mengenai peperangan yang berkaitan dengan Amerika Serikat yang mempengaruhi kapabilitas militer serta ekonomi, salah satunya yakni peperangan antara Amerika Serikat dengan Ukraina. Sebelum munculnya ketegangan terkait penangguhan bantuan militer yang dilakukan Amerika Serikat ke Ukraina, hubungan antara kedua negara ini terjalin cukup erat terutama setelah runtuhnya Uni Soviet pada awal tahun 1990-an (Prihodko 2023).

Amerika Serikat merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Ukraina pada tahun 1991 dimana sejak saat itu, kedua negara ini menjalin kerjasama strategis dalam bidang ekonomi, militer serta demokratisasi (Kondratenko 2020). Hubungan kedua negara menjadi lebih erat setelah krisis Krimea pada tahun 2014, ketika Rusia mengambil alih wilayah tersebut dari Ukraina. Setelah terjadinya kejadian tersebut, Amerika Serikat menjadikan dirinya sebagai mitra utama dalam mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Dukungan ini diberikan dalam bentuk penyediaan peralatan pertahanan, pelatihan pasukan militer, serta bantuan ekonomi dan kemanusiaan (Kondratenko 2020). Selain itu, Amerika Serikat juga aktif mendukung reformasi sektor keamanan dan antikorupsi di Ukraina guna memperkuat stabilitas dalam negeri dan mendorong transisi menuju sistem pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis. Dalam konteks tersebut, hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Ukraina dapat dikatakan sebagai hubungan yang saling menguntungkan dimana hubungan ini dilandasi kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas kawasan Eropa Timur dan membendung pengaruh agresif Rusia (Kondratenko 2020). Menjadi negara pendonor bantuan utama tidak menjamin bahwa Amerika Serikat lepas dari konflik peperangan. Salah satu konflik yang masih terjadi sampai sekarang yakni konflik

antara Amerika Serikat dengan Ukraina, yang mana salah satu penyebab terjadinya konflik antara kedua negara ini yakni terjadinya penangguhan bantuan militer Amerika Serikat yang semakin mencemaskan tepatnya ketika Donald Trump menangguhkan bantuan ke Kiev (SindoNews 2023).

Selain itu Amerika Serikat juga menegaskan mereka akan mencabut penangguhan bantuan militer untuk Ukraina dan melanjutkan pembagian informasi intelijen dengan Kiev. Dengan adanya ancaman penangguhan bantuan militer oleh Amerika Serikat ini membuat para petinggi Ukraina khawatir akan nasib pertahanan mereka, dimana bantuan dari Amerika Serikat juga sangat mempengaruhi pertahanan mereka. Hal ini semakin mengkhawatirkan ketika komando militer Ukraina minta bantuan tambahan demi memperkuat pasukannya yang mana pasukan Ukraina Timur memburuk dan berharap agar kembali mempunyai strategi yang kuat. Ukraina juga menyatakan mereka terbuka terhadap gencatan senjata 30 hari dalam perang tergantung pada persetujuan Kremlin (VOA 2024). Opini publik dan dinamika politik domestik di Amerika Serikat mempunyai pengaruh yang signifikan atas keputusan pemerintah dalam menyalurkan bantuan militer ke luar negeri, termasuk Ukraina. Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat yang menganut prinsip checks and balances, keputusan eksekutif atas alokasi anggaran bantuan militer tidak dapat dilepaskan dari persetujuan Kongres (Mangi 2018). Di tengah meningkatnya polarisasi politik, isu bantuan militer ke Ukraina sering kali menjadi bahan perdebatan antara partai republik dan partai demokrat, dimana umumnya partai demokrat mendukung bantuan sebagai bentuk komitmen terhadap sekutu dan stabilitas internasional, sementara dalam partai republik akan mempertanyakan seberapa besar anggaran yang akan dikeluarkan

dan meminta agar prioritas dialihkan ke masalah domestik seperti inflasi dan keamanan perbatasan (Tama 2023). Semasa Donald Trump menjadi presiden terdapat tekanan oposisi terkait kebijakan luar negeri juga menimbulkan dinamika yang kompleks, terutama saat bantuan ke Ukraina sempat ditangguhkan yang akhirnya memicu proses pemakzulan terhadap Trump. Selain tekanan dari kongres, opini publik juga menjadi peran penting, dimana dukungan masyarakat terhadap intervensi militer di luar negeri cenderung fluktuatif, dan bergantung pada kondisi ekonomi domestik serta narasi yang dibangun oleh media (Minicozzi-Wheeland 2020).

Ketika masyarakat mulai meragukan efektivitas bantuan militer atau menyadari bahwa bantuan tersebut tidak membawa dampak langsung bagi keamanan nasional, maka tekanan terhadap pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan bantuan militer pun semakin kuat. Oleh sebab itu, keputusan untuk terus memberikan bantuan militer ke Ukraina bukan semata-mata soal strategi luar negeri melainkan juga cerminan dari pertimbangan politik domestik yang kompleks dan dinamis. Konflik yang terjadi antara kedua negara ini tentunya menimbulkan dampak, untuk dampak yang didapatkan Amerika Serikat adalah dampak terhadap kapabilitas ekonomi dan militer yang cukup signifikan. Pada dampak ekonomi Amerika Serikat mendapatkan peningkatan dalam pengeluaran karena memberikan bantuan finansial serta militer yang tentunya dalam jumlah yang tidak sedikit untuk Ukraina. Alokasi anggaran yang dikeluarkan Amerika Serikat menunjukkan komitmen yang cukup besar, namun tetap dalam batas yang terukur dibandingkan keseluruhan APBN Amerika Serikat. Sejak peristiwa invasi Rusia ke Ukraina tepatnya Februari 2022 hingga pertengahan 2024, Amerika Serikat kurang lebih

sudah mengalokasikan sekitar 175 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan. Jika dibandingkan dengan total anggaran federal tahunan Amerika Serikat yang mencapai 6 triliun dolar Amerika Serikat, maka bantuan untuk Ukraina berada di sekitaran 2-3 persen dari total APBN (Alifiobono dkk. 2023). Presentase ini terlihat kecil dalam keseluruhan anggaran namun tetap nilainya signifikan dalam hal dukungan terhadap Ukraina dan menunjukkan kekuatan fiskal serta komitmen geopolitik Amerika Serikat. Sebagian besar dana bantuan tersebut berasal dari pendanaan khusus yang telah disetujui oleh Kongres yang menandakan bahwa alokasi ini adalah tambahan bukan berasal dari pemotongan anggaran pos domestik utama seperti jaminan sosial atau kesehatan.

Adanya konflik antara Amerika Serikat dengan Ukraina tentu mempunyai kesinambungan dengan hubungan Amerika Serikat dengan Afghanistan yang dapat dilihat dari aspek geopolitik, strategi kebijakan luar negeri maupun implikasi atas tatanan keamanan internasional (Simpson 2023). Ketika Amerika Serikat menarik pasukan militernya di Afghanistan pada Agustus 2021, Amerika Serikat menghadapi tantangan serius mengenai kredibilitas globalnya yang mana akibat dari keputusan tersebut menjadikan Amerika Serikat dipandang sebagai negara yang melemah komitmennya terhadap sekutunya, yang akhirnya menimbulkan pendapat bahwa Washington lebih selektif dalam memprioritaskan geopolitiknya. Kedua konflik tersebut juga memperlihatkan pergeseran fokus strategis Amerika Serikat, dimana di Afghanistan tujuan awalnya adalah memerangi terorisme dan membangun pemerintahan yang stabil, namun tujuan tersebut tidak tercapai yang akhirnya membuat Amerika Serikat mengalihkan fokusnya terhadap ancaman yang

lebih strategis. Sementara untuk konflik dengan Ukraina menjadi tantangan uji baru untuk komitmen Amerika Serikat atas prinsip kedaulatan dan pertahanan sekutu yang ada dibawah naungan NATO (Simpson 2023). Sehingga aksi yang dilakukan Amerika Serikat kepada Ukraina dapat dilihat sebagai upaya dalam memperbaiki citra yang sempat tercoreng akibat kegagalan di Afghanistan. Kesenambungan lainnya juga ada pada dampak atas politik domestik, dimana kedua konflik yang terjadi di kedua negara memicu perdebatan sejauh mana Amerika Serikat akan terlibat dalam konflik luar negeri, khususnya saat menghadapi keterbatasan sumber daya dan keresahan publik atas perang yang berkepanjangan. Antara Afghanistan maupun Ukraina, dukungan politik atas kebijakan intervensi mengalami fase naik turun dimana hal ini terjadi akibat faktor ekonomi, pertimbangan elektoral maupun opini media (Song 2024). Sehingga, meskipun secara geografis dan konteks konflik atas kedua negara ini berbeda, Afghanistan dan Ukraina berkesinambungan melalui aspek strategi Amerika Serikat, respons atas tantangan geopolitik dan pengaruh atas kredibilitas Amerika Serikat di pandangan internasional .

Dari segi kapabilitas militer dampaknya menjadi sebuah ajang untuk Amerika Serikat dalam memperlihatkan kekuatannya serta pengaruhnya melalui NATO. Secara keseluruhan adanya konflik kedua negara ini membebani Amerika Serikat namun hal ini juga menunjukkan bagaimana Amerika Serikat mempunyai peran dominan dalam geopolitik global, dimana meskipun sempat membuat Amerika Serikat kesusahan dalam menyalurkan bantuannya, tetapi Afghanistan tetap mendapatkan bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat meskipun skala dan intensitasnya menurun dibandingkan periode sebelum 2021. Keberhasilan Amerika Serikat dalam tetap konsisten memberikan bantuan kemanusiaan ini membuktikan

kalau negara ini mempunyai sistem pertahanan yang baik dalam mengelola pasukan militernya serta penyaluran bantuan dari anggaran negara mereka (Kumar 2022).

### **3.3. International Context**

International context secara general mengacu terhadap sebuah kondisi, situasi, atau lingkungan global yang berdampak dan membentuk suatu peristiwa, kebijakan, atau tindakan suatu negara dalam hubungan dengan negara lain (Gleditsch dan Ward 2006). Dalam konteks pembahasan penelitian ini, international context merujuk pada faktor-faktor global dan hubungan antarnegara yang dapat mempengaruhi atau membentuk dinamika bantuan kemanusiaan ke suatu negara. Pengaruh kebijakan luar negeri negara-negara pendonor terhadap bentuk bantuan kemanusiaan di Afghanistan sangat signifikan, karena bantuan tersebut kerap tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, tetapi juga di atas namakan sebagai kepentingan politik, ekonomi, dan strategis negara pendonor. Amerika Serikat sendiri menjadi negara yang menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari strategi politik luar negeri mereka dalam mendukung stabilitas kawasan dimana mereka menekan pengaruh kelompok teroris serta memperkuat posisi geopolitik mereka di Asia Tengah (Shawn Chuang 2023). Faktor yang mempengaruhi ada berbagai elemen seperti politik global, kebijakan luar negeri negara pendonor, peran suatu lembaga internasional, konflik geopolitik, dan respon dari komunitas internasional.

Kondisi militer internasional di Afghanistan sendiri awalnya berada dibawah ISAF (International Security Assistance Force) ISAF adalah misi keamanan yang berada dibawah naungan kuasa NATO yang ada di Afghanistan

yang didirikan oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2001 saat konferensi Bonn. ISAF sendiri dibentuk atas kerjasama antar negara demi mencapai tujuan guna mensukseskan beberapa program rekonstruksi di Afghanistan. ISAF yang berada naungan NATO dituntut agar beroperasi melawan negara yang menimbulkan ancaman untuk Afghanistan seperti Taliban, selain itu ISAF juga mempunyai peran agar mendukung dan melatih pasukan Afghanistan dan mencegah masuknya penyebaran narkoba di Afghanistan (Yessi Olivia dan Anis Susanti 2014). Perjalanan ISAF dalam mencapai tujuannya tentu harus melewati banyak hambatan, terdapat banyak sekali misi yang terhambat karena pesatnya pertumbuhan beberapa kelompok teroris yang tersebar di pelosok daerah di Afghanistan yang menjadi salah satu faktor banyak misi yang belum bisa dituntaskan (Perkasa, 2015). Banyaknya misi serta tujuan yang belum terealisasi membuat pasukan ISAF tidak bertahan lama, setelah hampir 13 tahun masa berperang akhirnya Amerika Serikat dan NATO resmi mengakhiri konflik di Afghanistan dengan mengadakan acara di markas besar militer mereka yang berada di Kabul tepatnya pada hari minggu, 28 Desember 2014. Adanya acara itu sekaligus menjadi penanda berakhirnya misi ISAF yang nantinya digantikan dengan hanya menjadi pendukung dengan 13.500 tentara (VOA 2014). Kemunduran ISAF membuat Afghanistan memasuki era baru yang ditandai dengan peralihan tanggung jawab keamanan yang sepenuhnya dipegang oleh pasukan nasional Afghanistan. Sebelumnya ISAF yang dibentuk oleh NATO bertugas untuk menstabilkan negara dan melatih militer lokal, namun ketika ISAF dihapuskan, kehadiran militer asing berkurang drastis dan digantikan oleh misi Resolute Support yang berfokus dalam pelatihan dan pendampingan bukan operasi tempur langsung. Berkurangnya

pasukan asing membuat Taliban mulai memperluas kekuasaannya mereka juga memanfaatkan kelemahan yang ada dalam pemerintahan dan pasukan keamanan Afghanistan (Snetkov dan Aris 2013).

Selama keterlibatan militer internasional dibawah ISAF, banyak bantuan yang disalurkan serta diarahkan untuk mendukung program-program yang mempunyai kepentingan yang sejalan dengan Amerika Serikat, seperti pelatihan militer, penguatan institusi negara dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kestabilan pemerintah pusat. Bantuan kemanusiaan pun sering kali disebut dalam konteks nation-building atau state-building, bahkan murni untuk keperluan penyelamatan masyarakat sipil yang terkena dampak konflik, dimana hal ini menunjukkan bahwa bentuk dan prioritas bantuan sangat ditentukan oleh arah kebijakan luar negeri pendonor (Bizhan 2017). Dinamika hubungan antara Amerika Serikat dengan pemerintah Afghanistan memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan misi kemanusiaan dan pembangunan di Afghanistan. Hubungan ini tentunya tidak selalu berjalan mulus dikarenakan kerap dikelilingi oleh ketidakpercayaan, perbedaan kepentingan dan persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan bantuan. Amerika Serikat sebagai negara pendonor tentu membutuhkan jaminan dimana bantuan kemanusiaan yang mereka berikan benar-benar digunakan untuk tujuan guna pembangunan berkelanjutan dan tidak disalahgunakan oleh pemerintah yang telah lama menjadi masalah struktural di Afghanistan (Akbari 2023).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mempunyai peran yang penting dalam upaya menyelesaikan konflik di Afghanistan, terutama melalui pendekatan diplomatik, kemanusiaan, dan pembangunan jangka panjang. Semenjak jatuhnya

kekuasaan rezim Taliban pada tahun 2001, PBB mulai aktif terlibat melalui misi politiknya yakni United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) yang bertujuan untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi nasional, pemilu, perlindungan hak asasi manusia serta koordinasi bantuan internasional. Misi ini diresmikan pada tanggal 28 Maret 2002 melalui resolusi dewan keamanan PBB sebagai respon terhadap tergulingnya rezim Taliban dan meningkatnya kebutuhan akan stabilitas politik, sosial dan ekonomi di Afghanistan.

UNAMA sendiri menggunakan pendekatan multilateral yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara berbagai pihak yang berseteru, dan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan jangka panjang. Sebagai bentuk tanggung jawab menjadi aktor yang penting dalam menangani isu di Afghanistan, PBB juga aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada jutaan masyarakat sipil Afghanistan yang terkena dampak konflik berkepanjangan ini termasuk pengungsi internal dan kelompok rentan lainnya. Melalui berbagai badan dan program seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), World Food Programme (WFP), dan UNICEF. Dalam misi ini, PBB memastikan dimana kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan dan layanan kesehatan untuk masyarakat di Afghanistan dapat terpenuhi bahkan dalam situasi yang sulit (Sharp dkk. 2002). Selain UNAMA, PBB juga membentuk sebuah mekanisme pendanaan yaitu Afghanistan Humanitarian Fund (AHF) dibentuk pada tahun 2014 yang ditujukan agar dapat merespons cepat terhadap segala kebutuhan atau keadaan darurat (United Nations, 2022). Meski demikian, upaya dari PBB tentunya tidak terlepas dari tantangan besar, seperti ketidakstabilan politik, meningkatnya kriminalitas, serta sulitnya menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok

bersenjata termasuk kelompok Taliban. Meskipun demikian, PBB terus mendorong pendekatan damai dengan memfasilitasi dialog antar pihak yang sekiranya ikut terlibat dengan menekankan bagaimana pentingnya solusi politik yang inklusif dan menghormati hak-hak sipil. Dalam konteks penarikan pasukan militer Amerika Serikat dan perubahan kekuasaan di Afghanistan pasca tahun 2021, peran PBB menjadi semakin kompleks namun tetap krusial, terutama dalam memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tidak terganggu oleh dinamika politik dan terus mendorong transisi yang stabil demi kepentingan masyarakat Afghanistan secara luas sekaligus menekan kemungkinan pemanfaatan bantuan yang bertujuan dalam sektor politik oleh kelompok penguasa (Shafiei dan Overton 2023)

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Konflik berkepanjangan di Afghanistan yang melibatkan pasukan dari Amerika Serikat dan kelompok Taliban tentu menimbulkan krisis kemanusiaan yang serius, dimana lebih dari dua dekade negara ini diliputi oleh peperangan dan ketidakstabilan politik yang menyebabkan ratusan ribu korban jiwa dan penderitaan yang dialami oleh warga sipil, terutama anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan kelaparan. Menurut data yang telah ada sebelumnya, lebih dari 350.000 jiwa terenggut dan sekitar 3,2 juta anak menderita gizi buruk yang disebabkan oleh konflik ini. Selain itu Afghanistan juga mengalami kerusakan besar yang mendorong berbagai negara khususnya Amerika Serikat untuk memberikan mereka bantuan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan masyarakat sipilnya. Amerika Serikat pun akhirnya menjadi salah satu negara yang paling banyak memberikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan, dimana sejak tahun 2011, Amerika Serikat sudah memberikan bantuan ke Afghanistan sebanyak lebih dari 5,8 Miliar US Dolar, sebagai bagian dari upaya rekonstruksi dan stabilisasi negara setelah invasi militer Amerika Serikat serta menjaga stabilitas regional dan meringankan krisis kemanusiaan ekstrem. Meskipun di tahun 2021 Amerika Serikat menarik pasukan militernya dan tidak ingin mengakui kedaulatan Taliban, Amerika Serikat tetap melanjutkan bantuan kemanusiaannya sebagai salah satu bentuk tanggung jawab moral meskipun tentu terdapat tantangan besar dalam pendistribusian bantuan akibat sanksi yang diberlakukan terhadap Taliban. Kebijakan Amerika Serikat

tentunya mencerminkan dualitas antara memberikan bantuan kemanusiaan guna mencegah krisis sosial yang semakin parah serta menerapkan sanksi ekonomi dan politik terhadap Taliban untuk melemahkan rezim tersebut. Amerika Serikat pun menggeser strategi menuju diplomasi serta melakukan perjanjian perdamaian dengan Taliban, yang melibatkan kesepakatan gencatan senjata, penarikan pasukan yang bertahap. Adanya strategi ini Amerika Serikat berusaha memberdayakan lembaga masyarakat serta pemerintahan di Afghanistan secara berkelanjutan. Konteks internasional pada penelitian ini merujuk pada faktor-faktor global dan hubungan antar negara yang memberikan pengaruh terhadap dinamika bantuan kemanusiaan ke Afghanistan. Kebijakan luar negeri negara pendonor, khususnya Amerika Serikat berperan dalam menentukan bentuk bantuan yang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, serta strategi politik, ekonomi dan geopolitik di kawasan Asia Tengah. ISAF, misi keamanan yang dibentuk NATO di Afghanistan sejak tahun 2001 berperan dalam menstabilkan militer lokal, namun berakhir pada tahun 2014 dan digantikan oleh misi Resolute Support yang lebih berfokus pada bantuan. Penarikan pasukan asing memberikan ruang untuk Taliban dalam memperluas kendali kekuasaan mereka. Program-program bantuan sering kali dikaitkan dengan agenda pembangunan negara yang didorong oleh kepentingan Amerika Serikat dengan tantangan akuntabilitas dan transparansi. Tidak hanya itu, melalui UNAMA dan AHF, PBB telah aktif dalam diplomasi dan memberikan bantuan kepada jutaan warga sipil di Afghanistan pasca penarikan pasukan militer Amerika Serikat pada tahun 2021, yang mana PBB berperan penting dalam menjaga stabilitas di Afghanistan.

## 4.2. Rekomendasi

Melalui analisis dan penelitian yang telah didapatkan, penulis tentunya menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat kekurangan dalam penyusunannya, agar penelitian mengenai topik ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna, maka penulis akan memberikan beberapa usulan yang menjadi rekomendasi dalam penelitian. Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan untuk yang nantinya akan membuat penelitian serupa adalah dapat mengeksplorasi lebih dalam dampak nyata dari sanksi atas kelompok Taliban terhadap distribusi bantuan tingkat lokal, dan bagaimana aktor non-negara beradaptasi dengan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Selanjutnya, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam perspektif masyarakat Afghanistan mengenai bentuk dan efektivitas bantuan yang mempertanyakan apakah bantuan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat sipil atau justru memperkuat kontrol politik tertentu. Terakhir, penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan pendekatan teoritis tambahan seperti *human security* agar analisisnya semakin akurat dan merefleksikan kompleksitas isu-isu bantuan yang terjadi di negara konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

AJIL. 2023. "The United States Establishes Fund for the Afghan People from Frozen Afghan Central Bank Assets." *American Journal of International Law* 117 (1): 139–44. <https://doi.org/10.1017/ajil.2022.87>.

Akbari, Mohammad Qasim. 2023. "US Foreign Policy Towards Afghanistan. Brief from 2001 to 2022." *Akademik Tarikh ve Dusunce Dergisi*, Desember 25, 10. <https://doi.org/10.46868/atdd.2023.609>.

Akram, Saira, dan Muqarrab Akbar. 2023. "US Withdrawal from Afghanistan: Emerging Challenges and Future Prospects." *Global Foreign Policies Review VI (I)*: 97–111. [https://doi.org/10.31703/gfpr.2023\(VI-I\).09](https://doi.org/10.31703/gfpr.2023(VI-I).09).

Alifiobono, Adeva, Syaiful Anam, dan Kinanti Rizsa Sabilla. 2023. "Analisis Kebijakan Pemberian Bantuan Militer Amerika Serikat kepada Ukraina Selama Masa Invasi Rusia 2022." *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (JJPSS)* 5 (2): 44–68. <https://doi.org/10.29303/ijps.v5i2.135>.

Andisha, Nasir A. 2022. "The Collapse of State in Afghanistan: A Repeat of History?" *Journal of Asian Security and International Affairs* 9 (3): 369–82. <https://doi.org/10.1177/23477970221129901>.

ANTARA. 2021. "AS akan danai bantuan untuk Afghanistan, bukan pemerintahnya - ANTARA News." <https://www.antaranews.com/berita/2371430/as-akan-danai-bantuan-untuk-afghanistan-bukan-pemerintahnya>.

Bateman, Kate. 2023. "A Shift Toward More Engagement with the Taliban? | United States Institute of Peace." Oktober 25. <https://www.usip.org/publications/2023/10/shift-toward-more-engagement-taliban>.

Bennett, Brian. 2021. "Biden Wants to Send Aid to Afghanistan But Not Support Taliban | TIME." September 22. <https://time.com/6100839/biden-afghanistan-aid-taliban/>.

Bizhan, Nematullah. 2017. *Aid Paradoxes in Afghanistan: Building and Undermining the State*. 1 ed. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315170701>.

Blankshain, Jessica D. 2019. "Foreign Policy Decision-Making." Dalam *International Relations*, oleh Jessica D. Blankshain. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199743292-0269>.

Coplin, William D. 1974. *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*. With Internet Archive. Chicago: Rand McNally College Pub. Co. <http://archive.org/details/introductiontoin0000copl>.

Copp, Tara. 2024. "Top Former US Generals Say Failures of Biden Administration in Planning Drove Chaotic Fall of Kabul." AP News, Maret 19. <https://apnews.com/article/afghanistan-kabul-milley-taliban-biden-620fd2ca8187389da38ddcf3f94666bd>.

Cowan, James M. 2023. "Calibrating Engagement with the Taliban." *Survival* 65 (5): 37–41. <https://doi.org/10.1080/00396338.2023.2261243>.

Desai, Vandana, Vandana Desai, dan Rob Potter, ed. 2014. "4 Humanitarian Aid." Dalam *The Companion to Development Studies*, 0 ed. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203528983-108>.

DetikNews. 2021. "AS Tetap Janji Bantu Afghanistan Meski Beri Sanksi ke Taliban." <https://news.detik.com/internasional/d-5740635/as-tetap-janji-bantu-afghanistan-meski-beri-sanksi-ke-taliban>.

Dewi, Kadek Meilanie Chandra, dan Anak Agung Sri Utari. 2022. "DAMPAK PENARIKAN PASUKAN AMERIKA DARI AFGHANISTAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA KHUSUSNYA HAK PEREMPUAN | Jurnal Harian Regional." Juni 30. <https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/id-84622>.

Dobbins, James, Andrew Radin, dan Laurel E. Miller. 2022. *Engage, Isolate, or Oppose: American Policy Toward the Islamic Emirate of Afghanistan*. <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA1540-1.html>.

Dr. Muhammad Tariq, Saira Bano, dan Muhammad Amir. 2021. "US Interest in Afghanistan and Current Peace Prospects." *sjesr* 4 (1): 365–70. [https://doi.org/10.36902/sjesr-vol4-iss1-2021\(365-370\)](https://doi.org/10.36902/sjesr-vol4-iss1-2021(365-370)).

Gibson, Joshua James. 2015. "An Unsustainable Arrangement: The Collapse of the Republic of Afghanistan in 1992." [https://etd.ohiolink.edu/acprod/odb\\_etd/etd/r/1501/10?clear=10&p10\\_accession\\_num=osu1429894687](https://etd.ohiolink.edu/acprod/odb_etd/etd/r/1501/10?clear=10&p10_accession_num=osu1429894687).

Gleditsch, Kristian Skrede, dan Michael D. Ward. 2006. "Diffusion and the International Context of Democratization." *International Organization* 60 (04). <https://doi.org/10.1017/S0020818306060309>.

Gordon, Joy. 2019. "The Not So Targeted Instrument of Asset Freezes." *Ethics & International Affairs* 33 (3): 303–14. <https://doi.org/10.1017/S0892679419000315>.

Imranullah, Akhtar, dan Manzanay Hakimuddin. 2024. "Strategic Interests and Geopolitical Considerations: Assessing the Importance of Afghanistan for the US Post-Withdrawal." *Journal of Arts, Humanities and Social Science* 1 (2): 1–9. <https://doi.org/10.69739/jahss.v1i2.18>.

Irsya, Irsa Tursina P, dan Zulian Ibnu. 2023. "Implementation Factors Of Gender Equality Regression In Post-Thaliban Victory Afghanistan: Afghanistan - Taliban | Journal of Global Perspective." Desember 15. <https://kti.potensiutama.org/index.php/JoGP/article/view/458>.

Joito Banjarnahor. 2025. *DAMPAK PENARIKAN PASUKAN AMERIKA SERIKAT TAHUN 2021 TERHADAP KEAMANAN MANUSIA DI AFGANISTAN SKRIPSI*.

Khan, Aamir, dan Aqsa Durrani. 2024. "The future of Afghanistan under Taliban-led regime: challenges and likely scenarios." *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)* 8 (1): 1–21. <https://doi.org/10.47264/idea.lassij/8.1.1>.

Kondratenko, Oleg. 2020. "US Policy Towards Ukraine in Conditions of the New World Order." *American History & Politics Scientific edition*, no. 9. <https://doi.org/10.17721/2521-1706.2020.09.3>.

Kumar, Ramesh. 2022. "Afghanistan: An Arena of Global Geopolitics: अफगानिस्तान: वैश्विक भू-राजनीति का एक अखाड़ा." *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary* 7 (3): 101–5. <https://doi.org/10.31305/rrijm.2022.v07.i03.017>.

Luerdi, Luerdi. 2022. "FOREIGN POLICY DECISION MAKING: STUDI KASUS KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA-TURKI." Preprint, Open Science Framework, Maret 28. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w89xq>.

Mangi, Lutfullah. 2018. "Role of Congress and Public Opinion in US Foreign Policy Making." *Pakistan Horizon* 48 (3): 39–54.

Miller, Laurel. 2022. "Protecting US Interests in Afghanistan." *Survival* 64 (2): 25–34. <https://doi.org/10.1080/00396338.2022.2055820>.

Minicozzi-Wheeland, L. 2020. "OVERLOOKED AGGRESSION: PRESIDENT TRUMP'S 2019 COERCION OF UKRAINE AND THE BUDAPEST MEMORANDUM." *International and Political Studies* 0 (33): 182–99. <https://doi.org/10.18524/2707-5206.2020.33.207030>.

Mockaitis, Thomas R. 2022. "Afghanistan and the COIN Conundrum." *Small Wars & Insurgencies* 33 (7): 1085–92. <https://doi.org/10.1080/09592318.2022.2111858>.

Musta'id, Ahmad. 2022. "Sejarah Islam dan Politik Afghanistan." *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 6 (2): 214–27. <https://doi.org/10.29408/fhs.v6i2.6605>.

Prikhodko, Oleg V. 2023. "The Ukraine conflict in the context of Russia-US relationship." *USA & Canada Economics – Politics – Culture*, no. 6 (Juni): 18–34. <https://doi.org/10.31857/S2686673023060020>.

Putra, Agung Tri. 2023. *Hegemoni Amerika Serikat di Afghanistan: Economic Turmoil and Food Insecurity Dilemma*. 5 (2).

Renshon, Jonathan, dan Stanley A. Renshon. 2008. "The Theory and Practice of Foreign Policy Decision Making." *Political Psychology* 29 (4): 509–36.

Republika. 2021. "Perjalanan Kedatangan AS Hingga Keluar dari Afghanistan | Republika Online."  
<https://internasional.republika.co.id/berita/qypgy81792115331/perjalanan-kedatangan-as-hingga-keluar-dari-afghanistan>.

Safira, Fifi, Zulkifli Harza, dan Maryam Jamilah. 2023. "Kebijakan Penarikan Pasukan Amerika Serikat Dari Afghanistan." *Palito* 2 (2): 54–71.  
<https://doi.org/10.25077/palito.2.2.54-71.2023>.

Sahputra, Indra, Gideon Candra Agape, Dian Ayu Anjani P, Axcel Geraldo A, Q. Firmansyah, dan M. Chusaini Ashari. 2022a. "Tantangan Pemberian Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat ke Afghanistan Tahun 2021." *Global and Policy Journal of International Relations* 10 (01). <https://doi.org/10.33005/jgp.v10i01.3571>.

Sahputra, Indra, Gideon Candra Agape, Dian Ayu Anjani P, Axcel Geraldo A, Q. Firmansyah, dan M. Chusaini Ashari. 2022b. "Tantangan Pemberian Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat ke Afghanistan Tahun 2021." *Global and Policy Journal of International Relations* 10 (01). <https://doi.org/10.33005/jgp.v10i01.3571>.

Salih Emir Mutluer. 2020. "Petrol ve Doğalgazın Uluslararası Piyasalara Ulaştırılmasında Jeopolitik Konum ve Kimliğin Etkilerinin İncelenmesi: Azerbaycan-Türkiye İlişkileri Örneği." *International Journal of Social, Political and Economic Research* 7 (2): 341–58.  
<https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss2pp341-358>.

Salsabila, Desfi Indah. 2023. "LATAR BELAKANG BERKUASANYA KEMBALI TALIBAN DI AFGHANISTAN PADA TAHUN 2021." *Jurnal Pena Wimaya* 3 (2). <https://doi.org/10.31315/jpw.v3i2.10218>.

Sawal, Javeria Noor, Anfal Afridi, dan Ruqaiya Bibi. 2022. "US-Taliban Peace Process: Post-Withdrawal Scenarios." *Global Political Review* VII (I): 92–99.  
[https://doi.org/10.31703/gpr.2022\(VII-I\).10](https://doi.org/10.31703/gpr.2022(VII-I).10).

Shafiei, Mahtab, dan Kathryn Overton. 2023. "Mirage or Oasis? Assessing the Role of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan." *Asian Journal of Peacebuilding* 11 (2): 357–76. <https://doi.org/10.18588/202311.00a398>.

Shahnan, Zabih Ullah, dan Ejaz Hussain. 2024. "US–Afghanistan Relations Post-Withdrawal: Is There a Future?" *Journal of Asian Security and International Affairs* 11 (3): 301–19. <https://doi.org/10.1177/23477970241265740>.

Sharp, Trueman W., Frederick M. Burkle, Andrew F. Vaughn, Rashid Chotani, dan Richard J. Brennan. 2002. "Challenges and Opportunities for Humanitarian Relief in Afghanistan." *Clinical Infectious Diseases* 34 (Supplement\_5): S215–28.  
<https://doi.org/10.1086/340706>.

Shawn Chuang, Shaochi. 2023. "The Distribution Of United States Foreign Aid." *International Journal of Arts, Humanities & Social Science* 04 (03): 24–26.  
<https://doi.org/10.56734/ijahss.v4n3a2>.

Sida, Lewis, dan Tina Nelis. 2022. *Theories of Change for WFP Afghanistan's Contribution to the Triple Nexus: Final Report*. Institute of Development Studies. <https://doi.org/10.19088/IDS.2022.067>.

Simpson, Erika. 2023. "Addressing Challenges Facing NATO and the United States Using Lessons Learned from Afghanistan and Ukraine." *Peace Review* 35 (2): 347–65. <https://doi.org/10.1080/10402659.2023.2204850>.

SindoNews. 2023. "3 Penyebab Hubungan Amerika Serikat dan Ukraina Retak, Salah Satunya karena Rusia." <https://international.sindonews.com/read/1537927/42/3-penyebab-hubungan-amerika-serikat-dan-ukraina-retak-salah-satunya-karena-rusia-1741075412>.

Smith, John T. 2011. *Corruption in Afghanistan - Somebody Else's Problem?:* Defense Technical Information Center. <https://doi.org/10.21236/ADA543829>.

Snetkov, Aglaya, dan Stephen Aris. 2013. "Introduction: Including the Other Sides of Afghanistan." Dalam *The Regional Dimensions to Security*, disunting oleh Aglaya Snetkov dan Stephen Aris. Palgrave Macmillan UK. [https://doi.org/10.1057/9781137330055\\_1](https://doi.org/10.1057/9781137330055_1).

Song, Yanan. 2024. "Ironclad US Commitment to NATO? From NATO Expansion to the Ukraine Crisis." *Cogent Social Sciences* 10 (1): 2282734. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2282734>.

Sriram, Chandra Lekha, Olga Martin-Ortega, dan Johanna Herman. 2010. "War, Conflict, and Human Rights." Dalam *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, oleh Chandra Lekha Sriram, Olga Martin-Ortega, dan Johanna Herman. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.494>.

Tama, Jordan. 2023. "Spending on Foreign Aid and Diplomacy." Dalam *Bipartisanship and US Foreign Policy*, 1 ed., oleh Jordan Tama. Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197745663.003.0009>.

The Lancet. 2021. "Afghanistan: The International Community Must Act." *The Lancet* 398 (10314): 1851. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02535-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02535-6).

The New York Times. 2018. "U.S. Aid Program Vowed to Help 75,000 Afghan Women. Watchdog Says It's a Flop. - The New York Times." <https://www.nytimes.com/2018/09/13/world/asia/afghanistan-women-usaid.html>.

Thomas, Clayton. 2025. "Afghanistan: Background and U.S. Policy In Brief | Congress.gov | Library of Congress." Juli 3. <https://www.congress.gov/crs-product/R45122>.

Tronc, Emmanuel, dan Anaïde Nahikian. 2018. "Fragile Future: The Human Cost of Conflict in Afghanistan." *SSRN Electronic Journal*, advance online publication. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3291982>.

VOA. 2014. “Komisi Senat AS Beri Saran soal Dana Rekonstruksi Afghanistan.” <https://www.voaindonesia.com/a/komisi-senat-as-sarankan-soal-dana-afghanistan/2498744.html>.

VOA. 2022. “Kongres AS: Bantuan untuk Afghanistan Merupakan ‘Bahaya Moral.’” <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-as-bantuan-untuk-afghanistan-merupakan-bahaya-moral-/6435350.html>.

VOA. 2024. “Amerika Segera Cabut Penangguhan Bantuan Militer Bagi Ukraina.” <https://www.voaindonesia.com/a/amerika-segera-cabut-penangguhan-bantuan-militer-bagi-ukraina/8007733.html>.

Yessi Olivia dan Anis Susanti. 2014. “Keefektifan North Atlantic Treaty Organization (Nato) Memimpin International Security Assistance Force (Isaf) di Afghanistan Tahun 2002-2012.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1 (2).